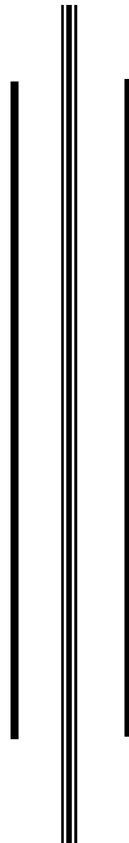


POLRI DAERAH JAWA TIMUR
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BOJONEGORO



**RENCANA STRATEGIS
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BOJONEGORO
BIDDOKES POLDA JATIM
TAHUN 2025 – 2029**



KEPUTUSAN KARUMKIT BHAYANGKARA BOJONEGORO BIDDOKKES POLDA JATIM
NOMOR: KEP/281 /VII/2025/RUMKIT, TANGGAL 31 JULI 2025

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BOJONEGORO



KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.III BOJONEGORO

Nomor : Kep/ 281 /VII/2025

tentang
RENCANA STRATEGIS RUMKIT BHAYANGKARA TK. III BOJONEGORO BIDDOKKES POLDA JATIM
TAHUN 2025 – 2029

KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. III BOJONEGORO BIDDOKES POLDA JATIM

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka panjang Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bojonegoro ada beberapa perubahan kebijakan, maka disusun Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bojonegoro Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bojonegoro dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2024-2045;;
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 4. Permen PAN – RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012, tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja Di Lingkungan Polri.
 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012, tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia
 8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;

9.Peraturan.....

2. KEPUTUSAN KARUMKIT BHAY BOJONEGORO

NOMOR : KEP/ 281 / VII / 2025

TANGGAL : 31 JULI 2025

9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011, tentang Sistem Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara Polri
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018, tentang Pelayanan Yankes Tertentu ;
11. Keputusan Kepala Kepolisian daerah Jawa Timur Nomor: Kep/295/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Rencana Strategis Polda Jatim TA 2025-2029
12. Keputusan Kepala Bidang Kedokteran dan Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Kep/105/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang Rencana Strategis Biddokes Polda Jatim TA 2025-2029 :

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1132/v/2025 Tanggal 23 Mei 2025 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA WAHYU TUTUKO BOJONEGORO BIDDOKES POLDA JATIM TENTANG PERUBAHAN ATAS SEBAGIAN ISI KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA WAHYU TUTUKO BOJONEGORO BIDDOKES POLDA JATIM NOMOR:KEP/ 281 / VII / 2025 / RUMKIT TENTANG RENCANA STRATEGIS RUMKIT BHAYANGKARA WAHYU TUTUKO BOJONEGORO TAHUN 2025 – 2029

1. Rencana Strategis Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Biddokes Polda Jatim Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Rumah Sakit Polda Jatim ini, sebagai landasan dan pedoman penyesuaian Rencana Strategis Satker:
2. Rencana strategis Rumkit Bhayangkara Bojonegoro Tahun 2025 - 2029 dimaksud berlaku dan sebagai pedoman untuk fungsi pelaksana di Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro;

3. KEPUTUSAN KARUMKIT BHAY BOJONEGORO

NOMOR : KEP/ 281 / VII / 2025

TANGGAL : 31 JULI 2025

3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 31 Juli 2025
PS.KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BOJONEGORO



Tembusan :

1. Kapolda Jatim;
2. Wakapolda Jatim
3. Itwasda Poldo Jatim
4. Karorena Poldo Jatim
5. Kabiddokkes Poldo Jatim.

DAFTAR ISI

Keputusan Karumkit Bhay. Wahyu Tutuko Bojonegoro Biddokkes Polda Jatim Nomor: Kep/281/VII/2025/Rumkit, tanggal 31 Juli 2025 tentang Rencana Strategis Rumkit Bhay. Wahyu Tutuko Bojonegoro Biddokkes Polda Jatim Tahun 2025 - 2029.

BAB I PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum.....	1
2. Perkembangan Lingkungan.....	6
3. Potensi dan Permasalahan	11
a. Potensi Ancaman.....	18
b. Analisa SWOT.....	19

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Visi	24
2. Misi	25
3. Tujuan.....	25
4. Sasaran Strategis	26
5. Hubungan keterkaitan tujuan dan Sasaran Strategis.....	28
6. Penahapan Kebijakan	29

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DANKERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jatim.....	30
2. Arah Kebijakan dan Strategi Biddokkes Polda Jatim.....	44
3. Arah Kebijakan dan Strategi Rumkit Bhaynagkara Bojonegoro Biddokkes Polda.....	46
4. Kerangka Regulasi Rumkit Bhaynagkara Bojonegoro Biddokkes Polda Jatim.....	48
5. Kerangka Kelembagaan.....	50

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja	53
2. Kerangka Pendanaan	54

BAB V PENUTUP

1. Kaidah pelaksanaan.....	56
2. Autentifikasi dan distribusi.....	56

LAMPIRAN

**RENCANA STRATEGIS
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BOJONEGORO
TAHUN 2025 – 2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Kondisi Umum

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan perlunya dilakukan perencanaan pembangunan nasional yang komprehensif. Dalam sistem perencanaan di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per-lima Tahunan yang kemudian akan diterjemahkan kembali oleh Kementerian/Lembaga ke dalam dokumen Renstranya masing-masing.

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2011 tentang susunan organisasi dan tata kerja Rumah sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rumah sakit Bhayangkara merupakan unsur pendukung yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kedokteran kepolisian untuk mendukung tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan kepolisian bagi Pegawai Negeri pada Polri dan keluarganya serta masyarakat umum secara prima.

Penyusunan Renstra Rumah sakit Bhayangkara Bojonegoro 2025-2029 mengacu pada dokumen di atasnya yaitu Renstra Polda Jatim dan Renstra Biddokkes Polda Jatim 2025-2029

untuk menyelaraskan apa yang ingin dicapai Polda Jatim dan Biddokes Polda Jatim melalui perencanaan 5 (lima) tahun ke depan yang ikut melibatkan peran Rumah sakit Bhayangkara di dalamnya. Rumah sakit Bhayangkara Bojonegoro, dalam hal menyusun dokumen perencanaan haruslah memperhatikan arahan strategis yang terdapat pada Renstra Polda Jatim dan Biddokkes Polda Jatim. Selanjutnya, Renstra Biddokes Polda Jatim ini menjadi acuan penyusunan Renstra Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Kerja dalam Rancangan Renstra Polri tahap I (2025-2029) yaitu Modernisasi Operasional (*Operational Modernization*), yang tercantum dalam dokumen *Grand Strategy* Polri (2025-2045) sebagai lanjutan dari *Grand Strategy* Polri (2005 – 2025), dimana Polri berusaha mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral dan modern melalui pembangunan dan penguatan konstruksi kelembagaan Polri sebagai pelayan masyarakat guna membangun kepercayaan masyarakat (*trust building*), membangun sinergi dengan seluruh komponen dan masyarakat yang disebut dengan (*Partnership Building*), memberikan jaminan rasa aman dan keadilan yang akuntabel, transparan, *open* dan patuh *rule of law*, Polri sebagai organisasi unggulan (*Strive for Excellence*) serta memberikan *service quality excellence* dengan tetap meningkatkan kepercayaan masyarakat, membangun kerjasama dengan *stakeholder* terkait.

Seiring dengan capaian keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun Pimpinan Polri untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan. Tuntutan dan harapan masyarakat tersebut antara lain:

- a. Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro yang memiliki postur yang cepat , tepat, amanah dan sepenuh hati dalam memberikan pelayanan Kesehatan;
- b. SDM yang profesional dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman bagi masyarakat;
- c. memberikan pelayanan secara profesional, proporsional, jujur, adil dan tuntas, serta mewujudkan transparansi dalam proses manajerial di Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro;

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan kegiatan pelayanan kedokteran kepolisian untuk mendukung tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan kepolisian bagi Pegawai Negeri pada Polri dan keluarganya serta masyarakat umum secara prima. Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro tetap dihadapkan dengan potensi dan

permasalahan. Potensi dan permasalahan akan dikerucutkan dari kondisi umum serta perubahan lingkungan strategis. Potensi dan permasalahan Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro yang dibahas lebih lanjut dalam Bab I ini menjadi pertimbangan tersendiri dalam penyusunan rencana strategis Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro.

Namun demikian, dukungan tersebut masih diperlukan untuk kelanjutan pelaksanaan kebijakan dan strategi yang bermuara pada pencapaian strategi kemitraan yang menuju pada organisasi unggul yang akan diimplementasikan sampai pada tahap ideal yaitu sebagai organisasi unggulan dengan mewujudkan pelayanan prima kepada Masyarakat diantaranya.

a. Peningkatan Pelayanan Kedokteran dan Kepolisian (Dokpol)

Sebagai penyelenggaran fungsi kedokteran dan kepolisian, Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro telah melaksanakan pelayanan kesehatan dengan kegiatan promotif preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk anggota polri dan PNS Polri, serta pelayanan Dokpol kegiatan dukungan tersebut berupa kegiatan pembuatan visum, baik korban mati maupun korban hidup, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang berguna untuk kegiatan projusticia. Kegiatan lain seperti vaksinasi serta kegiatan fogging dan penyuluhan juga terlaksana.

Diharapkan pada tahapan Renstra selanjutnya, Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro dapat meningkatkan kemampuan dalam hal Kedokteran Kepolisian, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tupoksi Polri khususnya di wilayah rayonisasi Rumah sakit lebih baik lagi.

b. Peningkatan pelayanan kesehatan yang profesional dan paripurna dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan pasien

Dalam hal pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro telah terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) versi 2012 dengan predikat "PARIPURNA" (Bintang 5), hal tersebut menunjukkan pelayanan pada Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh unit rumah sakit.

Tujuan peningkatan mutu pelayanan Kesehatan adalah tercapainya kemampuan dan ilmu pengetahuan sumber daya manusia Rumah sakit dalam melayani kesehatan, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari Tujuan Nasional. Untuk itu perlu ditingkatkan upaya guna

memperluas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mutu yang baik dan biaya terjangkau.

Untuk itu Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro melakukan beberapa upaya dalam membangun Postur yang ideal. Pembangunan ini diarahkan kepada Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro yang professional, bermoral, modern, dan unggul melalui perubahan "*mind set dan culture set*". Upaya yang dilakukan salah satunya yaitu dengan menambah jumlah personel yang memiliki standar kompetensi yang baik sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu juga melaksanakan kegiatan pelatihan ex house dan inhouse Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro.

d. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana rumah sakit yang modern dan berkualitas untuk menunjang pelayanan kesehatan yang professional.

Rumkit Bhayangkara Bojonegoro melakukan beberapa upaya dalam memenuhi sarana dan prasarananya guna mendukung penguatan tupoksi Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro. Dari capaian indikator kinerja utama untuk jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana, terpenuhinya Alat kesehatan dan perkantoran guna penguatan Tupoksi Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro yang diharapkan dapat digunakan oleh setiap unit untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada bidang Sarana prasarana, dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa telah melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), dalam pemenuhan Sarpras antara lain : penambahan peralatan kesehatan serta perkantoran, membangun fasilitas kesehatan dalam upaya memberikan dukungan bagi peningkatan Kamtibmas dan pelayanan masyarakat.

Diharapkan dengan dukungan peralatan tersebut Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro dapat meningkatkan kecepatan penanganan keluhan pasien yang datang ke Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro.

e. Pengembangan fasilitas gedung dan bangunan rumah sakit.

Mengingat pentingnya pelayanan kesehatan bagi setiap penduduk, menjadikan sebuah rumah sakit mempunyai peranan yang penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan haruslah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Peran Rumah Sakit sebagai pemberi pelayanan kuratif, rehabilitatif, promotif, dan preventif, menempati peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Karena pentingnya peran rumah sakit dalam sistem pelayanan kesehatan,

maka berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit menjadi prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan. Hal ini layak untuk diupayakan agar seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara terjangkau dan terlayani secara merata. Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro dalam menjawab kebutuhan masyarakat tersebut dengan cara mengembangkan fasilitas gedung dan bangunan.

Serta untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumkit Bhayangkara Bojonegoro di semua lini, baik kuantitas maupun kualitasnya maka Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro membuat kebijakan yaitu dengan mengembangkan Budaya Organisasi Rumkit yang baik (*Good Corporate Culture*) dan diawasi oleh personel yang menjwai motto **“Melayani Dengan Cepat, Tepat, Amanah dan Sepenuh Hati ”**. sekaligus menanamkan nilai-nilai (values) sebagai berikut :

a. Disiplin

Memahami dan melaksanakan kewajiban sebagai anggota Polri / PNS dengan penuh rasa tanggung jawab.

b. Keterbukaan (Transparency)

Dalam pengelolaan institusi Dokkes dilaksanakan secara terbuka sehingga ada saling kontrol untuk pembenahan apabila ada penyimpangan dalam pengelolaannya.

c. Tanggung Jawab (Akuntabilitas)

melaksanakan tugas dengan baik serta bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilaksanakan.

d. Jujur (Honesty)

Niat yang tulus dan hati yang bersih dalam rangka menciptakan institusi yang bersih.

e. Kebersamaan (Sense of Togetherness)

Keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi tidak dapat dilakukan hanya oleh satu atau beberapa orang saja, tapi harus oleh seluruh bagian dalam organisasi. Semuanya memiliki peranan dan tanggung jawab sesuai fungsi masing – masing dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi organisasi.

f. Rasa memiliki (Sense of Belonging)

Secara material dan spiritual institusi Dokkes adalah menjadi bagian dalam kehidupannya, sehingga senantiasa perlu dijaga dan dirawat.

g. Prestasi

Orientasi dalam bekerja adalah prestasi, sehingga dari hari kehari organisasi akan semakin baik, hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini.

h. Kesejahteraan (Prosperity)

Untuk mencapai prestasi yang diinginkan setiap pimpinan wajib memperhatikan kesejahteraan anggotanya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing – masing

2. Perkembangan Lingkungan Strategis

A. Luar negeri

1. Umum

- a. Pengejawatahan demokrasi dengan kebebasan berpendapat, berkumpul atau berserikat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia belum diimbangi dengan komitmen untuk menjaga kemanan dan ketertiban Bersama. Kondisi tersebut telah dimanfaatkan oleh kelompok fundamentalis anti Pancasila dan UUD 1945 yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, seperti paham Liberalisme, mendirikan Negara Islam Indonesia atau Khilafa Islamiyah (NII, JI, JAT, JAS, JAD, MMI, HTI) dan adanya kelompok yang berupaya menghidupkan kembali paham komunis, sehingga pada tahun 2025 s/d 2029 kelompok dan tersebut secara terus – menerus berusaha mewujudkan visi, misi dan tujuannya dengan suatu program terselubung atau nyata, maka dengan demikian situasi keamanan dalam negeri khususnya wilayah Jawa Timur masih akan diwarnai oleh potensi gangguan keamanan berupa gerakan yang dapat mengancam sendi - sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta Ideologi Pancasila, terutama diawali dari daerah eks konflik ideologi yaitu Madiun dan sekitarnya dengan dimotori oleh anak-anak keturunan PKI yang saat ini menduduki jabatan di legislatif dan eksekutif serta beberapa daerah menjadi embrio dan penyebaran kelompok radikal;
- b. Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina masih akan menjadi embrio munculnya reaksi dari berbagai elemen dan ormas Islam di Indonesia untuk melakukan aksi solidaritas turun ke jalan menentang tindakan dan agresi militer Israel terhadap Palestina yang dianggap sebagai sekutu Amerika, yang bermuara pada terjadinya ketidakharmonisan antar kehidupan umat beragama di Indonesia yang notabenebnya mayoritas beragama Islam;
- c. Paska pelaksanaan Pemilu 2029 dan tahapan Pemilu 2029, masih terdapat beberapa potensi konflik yang disebabkan oleh konflik antar massa pendukung pasangan calon yang kalah, dampak keputusan atas gugatan pasangan calon kalah kepada Mahkamah Konstitusi dan aksi unjuk rasa kepada penyelenggara Pemilu serta banyaknya deklarasi dari Capres;

- d. Krisis perekonomian global masih akan berlanjut, fluktuasi nilai rupiah terhadap dollar AS berdampak terhadap semua aspek kehidupan yang akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia pada umumnya, khususnya di Wilayah Jawa Timur, terutama pada sektor industri dan investasi akan terjadi persaingan kuantitas dan kualitas produk/jasa maupun harga antara produk domestik dengan produk asing, menurunnya investor asing akibat perekonomian global dan tekanan dari elemen buruh serta sumber energi yang tidak dapat diperbarui khususnya cadangan minyak bumi yang semakin menipis akan menimbulkan gejolak perekonomian nasional dan berdampak terhadap situasi kamtibmas Jawa Timur;
- e. Jawa Timur memiliki potensi strategis sebagai daerah transit, daerah rekrutmen dan latihan kelompok radikal khususnya Lamongan, Magetan, Madiun, Surabaya, Malang, Sidoarjo dan Madura. Aksi teroris yang terjadi di Indonesia terkait dengan ideologi-politik dan berimplikasi terhadap keamanan karena kelompok teroris berupaya menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi agama dengan memanfaatkan kondisi sosial masyarakat, aktifitas kelompok teroris diperkirakan akan berlanjut dengan pola operasi yang berubah dan sistem sel yang sulit terdeteksi, walaupun sudah banyak jaringan teroris yang tertangkap dan menjalani hukuman serta kembali kepada masyarakat namun terindikasi ideologinya belum mengalami perubahan yaitu dengan masih aktifnya sebagai nara sumber dilingkungan kelompok radikal dan dengan mendirikan yayasan Pondok Pesantren sebagai sarana kaderisasi anggota baru (rekrutmen) serta pembinaan dan pelatihan guna penyebaran paham guna mempengaruhi masyarakat;
- f. Kejahatan Transnasional, kejahatan terhadap perekonomian negara, kejahatan konvensional dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi diperkirakan akan semakin mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas terutama dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, modus operandi pelaku mengalami pergeseran dan memanfaatkan celah - celah hukum apabila tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana teknologi informasi serta implikasi lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas Polri apabila tidak dapat mengimplementasikan sebagaimana tugas pokok, fungsi dan peran serta kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang;
- g. Pengaruh perkembangan IT dan trend masa kini yang meniru trend Barat mempengaruhi sikap anak bangsa terhadap nilai-nilai budaya serta religius yang

semakin hilang di kalangan generasi muda yang notabenenya merupakan generasi penerus bangsa;

- h. Terus meningkatnya jumlah wisatawan asing maupun tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia melalui jalur udara maupun masuknya imigran gelap melalui pelabuhan laut di Indonesia masih dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan / jaringan antar negara sebagai akses masuknya peredaran Narkoba dan Psykotropika baik dalam skala besar maupun kecil;

2. Internasional

Lingkungan strategis global senantiasa berkembang dan dipengaruhi oleh isu-isu global seperti isu hak asasi manusia, krisis ekonomi, radikalisme dan terorisme, serta kejahatan lintas negara. Adapun fenomena global yang mempengaruhi konstelasi perubahan lingkungan strategis hingga saat ini meliputi:

- a. Langkah pemerintah Amerika Serikat yang mengubah fokus ke Asia akan semakin membebani Indonesia sebagai negara berpengaruh di ASEAN. Masih memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berpengaruh terhadap keseimbangan perekonomian global sehingga berdampak pula pada bidang pelayanan kesehatan;
- b. Dinamika ekonomi politik global juga terjadi dengan adanya perang dagang antara AS dan Tiongkok serta perang antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, persaingan antar negara juga terjadi pada pembangunan infrastruktur kawasan Asia dan Afrika, dimana Tiongkok mendorong kerja sama Belt and Road Initiative (BRI). Konflik yang sering terjadi di kawasan Afrika merupakan kepentingan dalam memperebutkan sumber daya alam akibatnya terhambatnya pasokan bahan dasar obat-obatan ;
- c. Perkembangan ekonomi nasional, masih dihadapkan dampak krisis keuangan global dan fluktuasi harga minyak dunia dan energi lainnya yang berpengaruh pada harga BBM nasional, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang \$ Dollar AS dan perdagangan bebas mengakibatkan naiknya harga obat-obatan;

3. Regional

Lingkungan strategis regional saat ini dipengaruhi beberapa isu, yaitu: konflik politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, sengketa perbatasan negara, baik perbatasan darat, laut, dan udara, kerja sama antara negara Asean di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan antara lain:

- a. Masih berlanjutnya interaksi hubungan Tiongkok dengan kekuatan utama di kawasan seperti AS, Jepang, Rusia dan Uni Eropa merupakan faktor berpengaruh dalam peta
- b. Masih perlu diantisipasi masalah isu Melanesian Brotherhood (persaudaraan Melanesia) digunakan sebagai strategi penyusunan kekuatan negara-negara Melanesia yang berpengaruh terhadap gerakan separatis Papua Merdeka;
- c. Isu keamanan banyak bersumber dari gangguan keamanan dilakukan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) memanfaatkan wilayah PNG yang mana daerah papua juga merupakan daerah penghasil bahan dasar obat yang dibutuhkan dalam peningkatan pelayanan kesehatan;
- d. Kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara termasuk dalam Segitiga Emas (The Golden Triangle) menjadi sorotan dunia, negara-negara kawasan Asia Tenggara mengecam peredaran Narkoba ancaman bangsa;
- e. Konflik akibat permasalahan lahan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah daerah / TNI / Polri, masyarakat dengan perusahaan BUMN/swasta, perusahaan dengan pemerintah daerah, yang tidak tertangani secara tuntas sehingga menimbulkan gangguan kamtibmas. (unjuk rasa, terhambatnya proyek infrastruktur).

B. Dalam negeri

Lingkungan strategis domestik/nasional tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi dalam negeri yang meliputi aspek Astagatra. yang dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Tri Gatra dan Panca Gatra. Dinamika lingkungan strategis nasional sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam negeri. Berikut diuraikan potensi gangguan Kamtibmas secara keseluruhan Asta Gatra.

a. Geografi

1. Kondisi geografis wilayah Indonesia yang berbatasan langsung maupun tidak langsung (Darat dan perairan laut) dengan negara tetangga, sebagai jalur keluar masuknya terorisme dan pelaku kriminalitas transnasional, termasuk pencurian

ikan di perairan wilayah Indonesia;

2. Kondisi geografi wilayah Indonesia yang masuk dalam Ring of Fire Pacific (Sabuk Api Pasifik) dan Sabuk Alpine, maka wilayah Indonesia rawan terjadinya Bencana Gempa Bumi Vulkanik. Selain hal tersebut di atas Indonesia dikelilingi oleh lempengan- lempengan bumi, antara lain lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Hal tersebut menjadi penyebab rawan terjadinya Bencana Gempa Bumi Tektonik, apabila lempengan-lempengan itu bergeser, patah, atau bahkan terjadi tumbukan;
3. Wilayah Indonesia yang memiliki banyak sungai sebagai sarana transportasi air sangat bermanfaat bagi masyarakat pedalaman, namun dalam perkembangannya berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pelaku penyelundupan barang, penyelundupan kayu (illegal logging), dan peredaran gelap Narkoba serta banyak pula sungai-sungai di Indonesia menjadi tambang emas ilegal dengan memanfaatkan bahan kimia jenis merkuri, sehingga terjadi pencemaran lingkungan di beberapa sungai di Indonesia.

2. Demografi

- a. Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, sehingga pertambahan jumlah penduduk cepat, penyebaran dan kepadatan penduduk tidak merata serta tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja serta fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup manusia lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan sebab terjadinya berbagai masalah konflik vertikal maupun horizontal;
- b. Sebagai bangsa yang heterogen Indonesia dengan bermacam- macam suku, budaya, agama dan adat berpeluang terjadinya konflik komunal (SARA). Faktor-faktor keberagaman ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar dan banyak aliran. Indonesia berpotensi terdapat beberapa masyarakat yang memiliki pemahaman radikal, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan melakukan aksi teror;

3. Potensi

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam skala global, regional maupun nasional seperti kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta teknologi transportasi, timbulnya konflik dengan berbagai latar belakang kepentingan, globalisasi, perubahan iklim/*global warming*, epidemiologi penyakit dan sebagainya dengan segala permasalahannya, mengakibatkan tugas yang dihadapi oleh Polri sebagai institusi, satuan dan fungsi serta perorangan akan semakin kompleks dan berat.

Tuntutan dan harapan masyarakat serta upaya pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan Polri yang prima, pelayanan publik yang berkualitas dan terselenggaranya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diselenggarakan dengan transformasi kultural dipadukan dengan penataan instrumental dan struktural sebagai suatu proses berkelanjutan harus diwujudkan dengan komitmen yang kuat dan konsisten.

Mengingat kondisi tersebut maka tuntutan dan harapan terhadap Dokkes Polri di seluruh jajaran semakin meningkat dan kompleks untuk mewujudkan tugas operasional Dokkes Polri yang handal dan profesional sesuai kebutuhan tugas-tugas operasional Polri serta mewujudkan personel dan satuan Polri yang sehat samapta dengan ditunjang masyarakat Polri yang sehat sejahtera. Dinamika perkembangan lingkungan strategis yang cepat, perkembangan teknologi yang pesat dan ancaman-ancaman baru perlu menjadi perhatian penting dalam menentukan arah perencanaan Dokkes Polri untuk lima tahun kedepan. Dinamika perkembangan ini perlu untuk ditinjau dari skala global, skala regional, maupun skala nasional.

a. Kondisi Global

1) Cuaca Ekstrem

Ancaman lingkungan akibat pemanasan global saat ini menjadi tantangan sangat serius untuk segera diatasi oleh semua negara di dunia. Cuaca ekstrem yang terjadi di seluruh belahan dunia memberikan dampak yang signifikan diseluruh sisi kehidupan. Badai El Nino masih diprediksi akan semakin intensif terjadi di tahun 2024. Kondisi ini akan berdampak pada terganggunya stok serta kenaikan harga bahan pangan pokok karena potensi gagal panen. Risiko yang berasal dari lingkungan menjadi tantangan terbesar yang dihadapi dunia dalam sepuluh tahun mendatang. Secara berurutan, risiko terbesar bermula dari kegagalan melakukan mitigasi perubahan iklim, lalu diikuti risiko kegagalan adaptasi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan keruntuhan ekologi, serta kelangkaan sumber daya alam. Perubahan cuaca ini sedikit banyak berdampak pada sector Kesehatan. Perubahan cuaca juga berdampak pada penyebaran

penyakit menular. Kenaikan suhu dan pola curah hujan yang tidak menentu dapat memperpanjang musim berkembangnya nyamuk, yang menjadi vektor penyakit seperti demam berdarah dan malaria.

2) Disinformasi buatan AI

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) generatif tengah disorot. Sejumlah laporan, baik dari media massa maupun perusahaan keamanan siber, menyebutkan bahaya cabang dari AI ini terhadap kehidupan masyarakat. Adapun, pemahaman tentang kecerdasan buatan, seperti AI generatif, terkait dengan literasi digital khususnya pilar digital skill. Keterampilan digital menjadi penting karena menyangkut pemahaman atas perangkat keras dan lunak TIK, serta sistem operasi digital.

AI generatif merupakan teknologi yang memungkinkan untuk menghasilkan karya baru secara otomatis baik berupa teks, audio, maupun gambar. Penciptaan konten sedemikian dimungkinkan karena sistem di dalamnya dilatih sedemikian rupa berdasarkan data yang tersedia. Sederhananya, AI generatif mampu menciptakan karya berdasarkan pustaka (library) data tersedia.

Di bidang Kesehatan, teknologi AI ini justru memberikan dampak positif yaitu tidak hanya membantu dalam mengurangi risiko kesalahan diagnosis, namun juga membantu dalam mempercepat diagnosis. Apalagi, pemanfaatan ini tidak hanya membantu seorang dokter, namun juga membantu masyarakat awam dalam menentukan pertolongan pertama yang tepat. Kondisi yang mungkin perlu untuk diantisipasi adalah kepada penggunaan AI di sektor Kesehatan yang jika terjadi secara massif, maka apakah kemudian Puskor Polri siap mengikutinya.

3) Krisis Biaya Hidup

Krisis biaya hidup merupakan risiko terbesar dunia yang akan mendominasi selama dua tahun ke depan. Krisis tersebut dipicu peningkatan pengeluaran rumah tangga akibat kenaikan harga pangan dan energi, serta belum pulihnya daya beli masyarakat selama pandemi Covid-19. Sejak akhir tahun 2019 dan kuartal awal tahun 2020, seluruh dunia secara bersama menghadapi pandemi COVID-19. Wabah tersebut tentunya menjangkit kesehatan dari perekonomian berbagai negara dan menimbulkan krisis berskala global baru sejak periode 2007–2009. Risiko krisis biaya hidup itu tidak hanya terjadi di beberapa negara maju, tetapi juga di sejumlah negara berpenghasilan menengah dan rendah.

Negara-negara itu antara lain Kanada, Inggris, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Botswana, Pantai Gading, Kamerun, Kostarika, Yunani, Israel, dan Malaysia. Pada krisis biaya hidup ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah (*poorer households*) lebih terdampak dibandingkan masyarakat dengan penghasilan menengah ke atas (*richer households*). Berdasarkan studi, masyarakat menengah ke bawah memiliki kebutuhan energi dengan tingkat konsumsi yang cukup besar. Sehingga dengan adanya kenaikan harga energi, akan berdampak lebih signifikan pada alokasi pengeluarannya. Sementara itu, dalam konteks kebutuhan makanan, harga makanan yang cenderung murah di mana kelompok masyarakat ke bawah cenderung bergantung dengan makanan itu—mengalami kenaikan harga yang signifikan. Bagi masyarakat menengah ke atas, kenaikan harga cenderung dapat dihadapi, namun ini sulit bagi masyarakat menengah ke bawah.

Kondisi ini juga tentunya memengaruhi perilaku masyarakat sebagai konsumen, yakni mereka memilih untuk berbelanja di toko yang menawarkan promosi, membeli substitusi yang lebih murah, bahkan memilih untuk tidak makan di luar (seperti restoran). Efek dari menabung di masa lalu pun mulai berperan penting di kondisi saat ini sebagai pelengkap disposable income untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akibat dari pandemi, para pekerja semakin memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan, serta mengharapkan adanya jam kerja fleksibel. Menghadapi krisis biaya hidup, para pekerja juga terdorong untuk bekerja dengan jam yang lebih lama.

4) Serangan Siber

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mengenai estimasi risiko siber di sektor finansial, estimasi total kerugian rata-rata tahunan yang dialami sektor jasa perbankan secara global yang disebabkan oleh serangan siber adalah mencapai 100 miliar dollar AS atau setara Rp 1.420 triliun (asumsi kurs Rp 14.200 per dollar AS).

5) Penurunan Ekonomi

Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul "*Is a Global Recession Imminent?*" memprediksi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2023. Prediksi tersebut, terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara

dalam upaya meredam laju inflasi. Penurunan ekonomi ini secara tidak langsung juga pasti akan berdampak kepada sector lainnya, salah satunya adalah sektor Kesehatan.

6) Serangan ke Infrastruktur

Infrastruktur merupakan hal penting dan mendasar sebagai kebutuhan bagi suatu negara. Hal ini juga menjadi prioritas pembangunan di negara-negara berkembang. Di negara maju, infrastruktur di bangun dan dilengkapi untuk memudahkan aktifitas di seluruh wilayahnya. Karena pentingnya, maka ada suatu pendapat bahwa, jika ingin menjatuhkan suatu negara, maka hancurkan infrastrukturnya. Kondisi global yang semakin memanas ini, mengakibatkan banyak negara-negara memperkuat persenjataannya, dan merencanakan untuk menyerang infrastruktur negara lain jika terjadi peperangan.

a. Kondisi Regional

1. Keamanan Siber

Keamanan siber global menjadi salah satu isu keamanan bagi para organisasi. Hal ini dibuktikan melalui survei yang dilakukan oleh Palo Alto Networks, yang menyebutkan bahwa para pemimpin bisnis di ASEAN sudah memprioritaskan isu keamanan siber sebagai salah satu dampak akibat pandemi Covid-19. Perkembangan teknologi dan sains yang secara masif menyokong hidup manusia saat ini dan sejalan dengan berkembangnya teknologi siber seperti implementasi *Internet of Things* dan teknologi *block chain*, memunculkan efek negatif berupa kejahatan siber. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan ekosistem digital, penggunaan internet yang semakin besar, serta serangan dan ancaman siber yang juga semakin besar, harus ditangani dengan serius pula.

2. Penyelundupan Narkoba

Kawasan Asia Tenggara memiliki luas area sekitar 4,4 juta KM² dan dikenal sebagai wilayah produksi narkoba “Golden Triangle” yang berada di perbatasan Thailand, Laos dan Myanmar. Salah satu negara tujuan penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara adalah Indonesia dan Provinsi Riau merupakan salah satu pintu gerbang masuknya narkoba secara ilegal dari negara lain terutama Malaysia.

3. Ancaman Pandemi

Pandemi Covid 19 yang terjadi beberapa tahun lalu membuat banyak negara-negara meningkatkan kewaspadaannya akan virus atau wabah penyakit yang sedang beredar agar tidak masuk secara massif di negaranya. Akhir- akhir ini sering diberitakan

bahwa merebaknya wabah penyakit cacar monyet. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi banyak negara berkembang yang bahkan belum benar-benar pulih dari dampak pandemi Covid kemarin.

b. Kondisi Nasional

1) Pandemi Covid -19

Pasca Pandemi Covid memberi dampak ke berbagai aspek bukan hanya Kesehatan namun juga berdampak kepada aspek ekonomi. Selain itu ancaman keamanan terus berkembang dan muncul dalam bentuk baru di masa pandemik ini. Indonesia perlu terus berkembang dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang akan dihadapi kedepannya.

2) Konflik Suku, Agama, RAS dan Antargolongan

Tantangan besar Indonesia khususnya pada tahun politik adalah maraknya hoaks dan ujaran kebencian, terutama yang bermuatan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Selain hoaks, tantangan besar yang dihadapi di tahun politik adalah merebaknya ujaran kebencian melalui media sosial. Menengara hoaks masif disebarkan bukan hanya karena rendahnya literasi digital masyarakat, namun juga karena fanatisme politik yang berlebihan. Semua itu berujung pada pudarnya kerukunan, menguatnya polarisasi, meningkatnya kebencian antar golongan, dan menurunnya kemanusiaan.

3) Radikalisme

Maraknya gerakan radikalisme yang merebak di tanah air tentunya mengkhawatirkan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Penyebaran hoax tanpa filter melalui sosial media membuat paham radikal makin subur. Persoalan saat ini adalah adanya gerakan-gerakan radikalisme yang memiliki agenda terselubung yang menggerogoti sendi-sendi negara yang ingin memecah belah bangsa Indonesia, melemahkan persatuan dan kesatuan merusak kebhinekaan yang sejak Indonesia berdiri telah menjadi konsensus bersama.

4) Serangan Siber

Pada tahun 2009 telah dilaporkan terdapat 290 juta kasus serangan siber. Dimana jumlah tersebut 25% lebih banyak dari tahun sebelumnya yang menyebabkan kerugian sekitar US\$ 34,2 miliar di Indonesia. Sedangkan Kemkominfo menyebutkan bahwa terdapat 5.000 laporan pengaduan Tindakan penipuan tiap minggunya. Sejak Maret hingga

Oktober tahun 2020 tercatat sebanyak 200.000 laporan pengaduan diterima melalui Whatsapp dan Instagram. Statistik tersebut menunjukkan Indonesia sudah dalam situasi darurat kejahatan siber.

5) *Human Trafficking*

Kasus perdagangan orang di Indonesia saat ini masih mengalami peningkatan. Korban perdagangan orang terjadi pada perempuan, anak, dan laki-laki. Bila di lihat dari jumlah perempuan dan anak-anak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), SIMFONI PPPA menyebutkan bahwa terdapat peningkatan angka korban sebanyak 62,5 persen pada tahun 2020. Sedangkan Kemenlu melaporkan telah mengidentifikasi 259 kasus perdagangan orang pada tahun 2019 (tercatat 164 kasus pada 2018, 340 kasus pada 2017, dan 478 kasus pada 2016). Jumlah ini termasuk 228 pekerja rumah tangga dan 31 yang bidang pekerjaannya tidak dilaporkan. Pemerintah perlu terus melakukan peningkatan upaya-upaya dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia.

6) *Penyelundupan Narkoba*

Upaya penyelundupan narkoba masih marak terjadi pada tahun 2022. Dalam kurun waktu 3 bulan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Bersama dengan Polri telah berhasil mengungkap sebanyak 20 kasus upaya penyundupan Narkoba dengan barang bukti sebanyak 1,2 ton. Penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia dilakukan dengan menggunakan jalur laut disepanjang garis Pantai perbatasan Provinsi Riau dan Malaysia. Jalur penyelundupan perairan laut ini dipilih dikarenakan beberapa faktor yaitu: jarak wilayah perairan yang dekat, banyaknya pelabuhan tidak resmi atau ilegal, minimnya patroli pengawasan di sepanjang wilayah perairan serta faktor profesionalitas aparat penegak hukum di wilayah perbatasan.

a. *Potensi Ancaman*

Berdasarkan kondisi global, regional, serta nasional tersebut, maka beberapa hal yang perlu penekanan dan menjadi perhatian penting yaitu:

Ancaman terkait sector kesehatan

1. Rendahnya cakupan pelayanan Kesehatan dan gizi masyarakat.
2. Pengendalian penyakit dan kapasitas ketahanan Kesehatan masih belum optimal.
3. Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit tropis terabaikan belum dapat dieliminasi, adanya ancaman penyakit berpotensi

wabah/kejadian luar biasa, dan perilaku hidup sehat belum membudaya.

4. Disparitas kapasitas sistem kesehatan terjadi di seluruh wilayah yang menyebabkan permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

b. Potensi Kekuatan

Selain dari ancaman tersebut diatas, perkembangan lingkungan global, regional, dan nasional juga memberikan beragam potensi yang dapat menjadi faktor penguat dalam menjalankan fungsinya, antara lain:

1. Dokkes Polri memiliki jangkauan yang cukup luas untuk melakukan pelayanan Kesehatan kepada Pegawai Negeri Pada Polri dan masyarakat karena memiliki Rumah Sakit Bhayangkara dan FKTP yang menyebar sampai di kewilayahan.
2. Dokkes Polri memiliki satuan kerja yang diakui ditingkat internasional dalam melakukan proses identifikasi jenazah korban bencana atau kejadian serius lainnya untuk kepentingan penyidikan (*DVI Polri – Disaster Victim Indentivication*).
3. Dokkes Polri memiliki laboratorium yang disertai dengan peralatan penunjang kegiatan di laboratorium yang handal guna mendukung tugas pokok dan fungsi Polri. Isu strategis nasional masih mengangkat sector Kesehatan yang secara langsung menjadi ranah Pusdokkes Polri untuk menjabarkannya ke dalam program dan kegiatan yang konkrit.
4. Bentuk organisasi dan kelembagaan Dokkes Polri sekarang ini memungkinkan Dokkes untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan dalam hal kedokteran dan Kesehatan kepolisian.

Rumah Sakit Bhayangkara sebagai unit yang memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, dalam tata Kelola keuangannya telah berbentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang memungkinkan Rumah Sakit Bhayangkara dapat menjalankan pelayannannya secara optimal

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam skala global, regional maupun nasional seperti kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta teknologi transportasi, timbulnya konflik dengan berbagai latar belakang kepentingan, globalisasi, perubahan iklim/*global warming*, epidemiologi penyakit dan sebagainya dengan segala permasalahannya, mengakibatkan tugas yang dihadapi oleh Polri sebagai institusi, satuan dan fungsi serta perorangan akan semakin kompleks dan berat.

Tuntutan dan harapan masyarakat serta upaya pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan Polri yang prima, pelayanan publik yang berkualitas dan terselenggaranya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diselenggarakan dengan transformasi kultural dipadukan dengan penataan instrumental dan struktural sebagai suatu proses berkelanjutan harus diwujudkan dengan komitmen yang kuat dan konsisten.

Mengingat kondisi tersebut maka tuntutan dan harapan terhadap Dokkes Polri di seluruh jajaran semakin meningkat dan kompleks untuk mewujudkan tugas operasional Dokkes Polri yang handal dan profesional sesuai kebutuhan tugas-tugas operasional Polri serta mewujudkan personel dan satuan Polri yang sehat samapta dengan ditunjang masyarakat Polri yang sehat sejahtera

a. Potensi ancaman

Polri menghadapi berbagai macam ancaman dan gangguan di bidang kamtibmas dan kamdagri, yang terkait dengan fungsi dan peran Rumkit antara lain :

- a. Dengan adanya kebijakan politik pemerintah tentang eraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perpres itu mengamanatkan pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan berlaku Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan sebagai wujud pelayanan yang merata pada rakyat Indonesia dan menuntut untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang prima;
- b. Kemampuan daya saing, dengan adanya pasar bebas semakin mudahnya perusahaan asing yang bergerak dibidang kesehatan untuk mendapatkan ijin mendirikan rumah sakit di Indonesia yang bertarap internasional yang didukung dengan modal yang kuat dan teknologi yang modern, menuntut kita agar senantiasa berbenah dan bekerja lebih keras dalam meningkatkan daya saing dalam pelayanan kesehatan;
- c. Kondisi krisis keuangan secara global dapat berdampak melanda dunia dengan berbagai akibat jangka panjang yang akan berpengaruh dalam kehidupan dan sendi-sendi ekonomi pada tahun-tahun mendatang yang berakibat pula bagi kehidupan berkeluarga dan di dalam masyarakat secara nasional;
- d. Dengan semakin tingginya berat beban hidup atau kesulitan ekonomi, lemahnya daya rekat sosial serta tingginya persaingan membuat sebagian masyarakat dan lingkungan kerja bersifat apatis terhadap pemerintahan, berpola pikir instan dan materialistis, selalu curiga, mudah emosi dan berperilaku masa bodoh. Hal ini berakibat berkurangnya kinerja dan rasa memiliki pada lingkungan disekitarnya;

- e. Gaya hidup liberalisme, penggunaan obat-obatan yang dilarang dan kehidupan sex bebas mendorong penggunaan narkoba dan obat-obatan psikotropika, disamping itu akan menimbulkan resiko terjangkitnya berbagai jenis penyakit kelamin HIV/AIDS;
- f. Peningkatan gangguan keamanan yang ditandai dengan meningkatnya kejahatan kriminal, rumah sakit turut membantu Kepolisian dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap tahanan yang harus rawat inap maupun rawat jalan;
- g. Terjadinya bencana alam, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor dan angin puyuh merupakan bencana yang tidak dapat dihindari dan memerlukan bantuan pelayanan kesehatan yang cepat;
- h. Masalah keamanan dilingkungan Rumah Sakit mendapat perhatian untuk menjaga barang-barang milik pasien maupun keluarga pasien, mengingatkan semakin maraknya kasus penipuan kepada keluarga pasien, hal ini sering terjadi karena akibat kecerobohan pasien dan keluarga.

b. Analisa SWOT

1) Kekuatan (Strengths)

- a) Letak Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro yang strategis berada di tengah-tengah kota yang mudah dijangkau oleh transportasi;
- b) Prestasi yang menonjol dalam menangani berbagai macam kasus pelayanan kesehatan terhadap anggota Polri, PNS Polri dan keluarga untuk memperoleh kenyamanan selama menjalani rawat jalan, rawat inap maupun mendapatkan pelayanan perawatan penunjang (Laboratorium, Radiologi, Apotik, IGD Kamar Operasi 24 jam) di Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro;
- c) Terbentuknya Team DVI (Disaster Victim Identification) yang merupakan bagian integral DVI Nasional khususnya penanganan kejadian musibah masal;
- d) Adanya kerjasama (MOU) dibidang Fungsi Dokpol dengan BPBD (Pemda Kab. Bojonegoro), BPJS kesehatan, PMI (Palang Merah Indonesia), dengan Kasat Lantas dan Jasa Raharja dalam penanganan Laka Lantas;
- e) Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro menjadi tempat rujukan dari Rumah Sakit, Puskesmas sekitarnya dan pasien BPJS dari poliklinik pratama Polres wilayah Bojonegoro, Lamongan dan Tuban;
- f) Mempunyai kamar operasi.

- g) SDM (Sumber Daya Manusia) yang mencukupi terutama tenaga Paramedis dan Non Paramedis dengan makin banyaknya tingkat Pendidikan Tinggi bidang Kesehatan di Wilayah Bojonegoro;
- h) SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki mempunyai toleransi yang tinggi dan disiplin yang berorientasi untuk mewujudkan personil yang berkinerja profesional, dengan manajemen yang sehat untuk rekrutmen, pendidikan, seleksi, penilaian kinerja dan jalur karir sampai masa purna bhakti;
- i) Kekuatan Rumah Sakit terdiri dari dokter spesialis 2 orang Organik dan 20 Dokter Spesialis Tamu, Dokter Umum: 9 orang, Dokter Gigi:1 orang, Apoteker: 5 orang, Perawat: 57 orang, Bidan: 19 Orang, Nakes Lain: 24 orang, Non Nakes Lain: 83 orang;
- j) Sudah terstandarisasi dengan akreditasi Versi baru SNARS;
- k) Adanya kerjasama dibidang pendidikan dalam hal praktek klinik keperawatan / kebidanan antara lain dari Lembaga Pendidikan Kesehatan;
- l) Memiliki 5 unit ambulan transportasi, 1 unit ambulan jenazah, 2 unit mobil operasional staf, dan 1 unit mobil operasional pimpinan.

2. Kelemahan (Weakness)

- a) Jumlah Personel belum sesuai DSPP Rumkit Polri tingkat III :
 - Sesuai DSSP: 51 personil
 - Personel Organik riil: 40 Orang (Polri: 13 dan PNS Polri : 27);
- b) Sering berubahnya sistem pelayanan BPJS kesehatan dari tingkat pusat maupun daerah sehingga menimbulkan pelayanan BPJS kesehatan kurang maksimal;
- c) Belum maksimalnya kemampuan personil dokpol untuk giat dukkes Polri;
- d) Kurangnya kemampuan personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di IGD maupun rawat inap;
- e) Masih adanya komplain dari pasien rawat inap terkait pelayanan rawat inap;
- f) Masih adanya karyawan yang kinerjanya kurang baik;
- g) Masih ada kejadian yang tidak diharapkan (KTD) pada pasien rawat inap;
- h) Masih adanya Infeksi Nosokomial pada pasien rawat inap (akibat pasang kateter, jarum infuse dan infeksi luka operasi);
- i) Terbatasnya lahan untuk pengembangan Rumkit dan kurangnya lahan parkir;

- j) Belum memiliki alat untuk pengolahan limbah padat, untuk saat ini masih bekerja sama dengan instansi lain dalam proses pengolahan limbah padat.
- k) Berlakunya Undang- undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, yang mengatur praktek dokter, khususnya dokter ahli/spesialis maksimal 3 (tiga) tempat praktek,mengakibatkan banyak Rumah Sakit Bhayangkara mengalami kesulitan mendapatkan dokter ahli tertentu.
- l) PP nomor 28 tahun 2024 tentang Klasifikasi rumah sakit berbasis kompetensi/ layanan
- m) Dengan diberlakukannya regulasi dari BPJS tentang perlakuan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar), hal ini menyebabkan dampak yang signifikan bagi rumah sakit jika tidak memenuhi kriteria dari BPJS maka rumah sakit tidak bisa bekerja sama dengan bpjs

3. Peluang (Opportunities)

- a) Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro berada pada tempat yang strategis yang berada di tengah kota sangat memungkinkan untuk dikembangkan untuk bersaing;
- b) Terbentuknya Team DVI (Disaster Victim Identification) yang merupakan bagian integral DVI Nasional khususnya penanganan kejadian musibah masal yang siap 24 jam;
- c) Adanya kerjasama (MOU) dibidang Fungsi Dokpol dengan BPBD (Pemda Kab. Bojonegoro), BPJS kesehatan, PMI (Palang Merah Indonesia) dan dengan Kasat Lantas dan Jasa Raharja dalam penanganan Laka Lantas;
- d) Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro menjadi tempat rujukan dari Rumah Sakit, Puskesmas sekitarnya dan pasien BPJS dari poliklinik pratama Polres wilayah Bojonegoro, Lamongan dan Tuban;
- e) Keberadaan Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro diharapkan menjadi pilihan yang utama bagi masyarakat umum di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya;
- f) Peranan seluruh bagian dan unit Rumah Sakit merupakan peluang yang dikedepankan sebagai sarana Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro untuk lebih memperkenalkan berbagai jenis pelayanan unggulan yang dimiliki, agar Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro lebih dikenal masyarakat umum;
- g) Sarana dan Prasarana yang dimiliki adalah modal yang kuat sebagai langkah Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro dalam membenahi sedikit demi sedikit untuk menjadi Rumah Sakit Kepolisian yang terbaik.

4. Ancaman (Threats)

- a) Letak geografis kota Bojonegoro menyebabkan adanya Banjir karena terletak di Bantaran Sungai Bengawan Solo;
- b) Semakin banyaknya rumah sakit dan klinik di wilayah Bojonegoro dengan tawaran jenis pelayanan dan harga yang bersaing;
- c) Kondisi perekonomian yang belum stabil berdampak pada kebutuhan hidup dan tuntutan primer masyarakat;
- d) Kecanggihan pemeriksaan diagnostik poliklinik swasta, sehingga banyak yang memilih pemeriksaan di Poliklinik Swasta;
- e) Dengan diberlakukannya KRIS oleh Bpjs maka Rumah sakit yang tidak memenuhi kriteria tidak bisa berkerja sama dengan bpjs.
- f) Terbukanya perdagangan bebas masyarakat ekonomi asia (MEA) sehingga mudah masuknya tenaga maupun sarana dari luar negeri.

c. Permasalahan

Dengan mencermati kondisi umum dan hasil analisis dengan pendekatan SWOT maka permasalahan yang teridentifikasi, adalah :

- 1) Jumlah Personel belum sesuai DSPP Rumkit Polri tingkat III :
 - Sesuai DSSP : 51 personil
 - Personel Organik riil : 40 Orang (Polri : 13 dan PNS Polri : 27);
- 2) Belum siapnya sistem pelayanan BPJS kesehatan dari tingkat pusat maupun daerah sehingga menimbulkan pelayanan BPJS kesehatan kurang maksimal;
- 3) keterbatasan personil dokpol untuk giat dukkes Polri;
- 4) adanya keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas personel dibandingkan dengan kebutuhan;
- 5) Masih adanya komplain dari pasien rawat inap terkait pelayanan rawat inap dan rawat jalan; ;
- 6) Masih adanya Infeksi Nosokomial akibat pasang kateter, jarum infuse dan infeksi luka operasi;
- 7) Belum lengkapnya alat kesehatan yang berkualitas;
- 8) Meningkatnya minat masyarakat yang berobat di Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro ;akan tetapi jumlah hunian pasien rawat inap tidak bertambah;

- 9) Masih ada sarana dan prasarana rumkit yang berusia tua sehingga perlu di lakukan pemeliharaan untuk memperpanjang usia pakai.
- 10) Berlakunya Undang- undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, yang mengatur praktek dokter, khususnya dokter ahli/spesialis maksimal 3 (tiga) tempat praktek,mengakibatkan banyak Rumah Sakit Bhayangkara mengalami kesulitan mendapatkan dokter ahli tertentu
- 11) PP nomor 28 tahun 2024 tentang Klasifikasi rumah sakit berbasis kompetensi/ layanan
- 12) alokasi anggaran yang tersedia masih terbatas sehingga belum semua fungsi dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi secara optimal
- 13) Kurangnya ruangan yang sesuai standar dari BPJS apa bila KRIS diberlakukan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DAN STRATEGIS

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis Rumkit Bhayangkara Bojonegoro menetapkan visi, misi dan tujuan organisasinya sebagai organisasi yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, serta penuh dengan koordinasi dan sinergi dalam melaksanakan tugas dan wewenang Polri di wilayah Jawa Timur yang mengemban tugas menyelenggarakan Kedokteran Kepolisian dan kesehatan Kepolisian bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum.

Dengan visi, misi dan tujuan tersebut, maka Rumkit Bhayangkara Bojonegoro dapat bekerja secara lebih terarah dan efektif. Personel Rumkit Bhayangkara Bojonegoro akan semakin terdorong untuk bekerja secara cerdas, berbudaya, dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan kreativitas dalam menghadapi tantangan tugas di masyarakat ke depan

1. Visi

a. Polda Jawa Timur

“ Terwujudnya Jawa Timur yang Maju, Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat “.

Makna Visi Polda Jatim:

Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang maju, aman dan tertib atas peran dan fungsi Polda Jawa Timur

b. Visi Biddokkes Polda Jatim

“Terwujudnya Pelayanan Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian yang Prima berorientasi pada PNPP dan masyarakat jajaran Biddokkes di wilayah Jawa Timur”.

Makna visi biddokkes:

Pemberian pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan bagi PNPP dan masyarakat yang prima dan profesional

c. Visi Rumkit Bhayangkara Bojonegoro Biddokkes Polda Jatim

Dalam mewujudkan fungsi dan peran Rumkit Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro di bidang Kedokteran Kepolisian dan kesehatan Kepolisian (pelayanan kedokteran dan kesehatan kesamptaan) yang dibutuhkan pada tugas opsional maupun pembinaan Polri harus direalisasikan secara optimal dengan kinerja tinggi serta mampu menjawab tantangan dan

ancaman kedepan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, maka dirumuskan visi Rumkit Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro tahun 2025-2029 sebagai berikut :

“ Terwujudnya Pelayanan Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian yang Prima pada PNPP serta masyarakat wilayah *di Bojonegoro dan sekitarnya* “

2. Misi

a. Polda Jawa Timur

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di Wilayah Hukum Polda Jawa Timur.”

Makna :

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat di Wilayah hukum Polda Jawa Timur dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

b. Misi Biddokkes Polda Jatim

“Menyelenggarakan kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan prima pada PNPP dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana jajaran Biddokkes di wilayah Jawa Timur”

c. Misi Rumkit Bhayangkara Bojonegoro Biddokkes Polda Jatim

- a. Menyiapkan SDM yang unggul dan professional
- b. Mengembangkan sarana dan prasarana yang memadai dan modern
- c. Memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota POLRI, PNS, Keluarga dan masyarakat umum secara paripurna
- d. Menyelenggarakan pelayanan Dokpol dan DVI dalam mendukung tugas operasional Kepolisian.;
- e. Mewujudkan pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif dan lancar.

3. Tujuan

a. Polda Jawa Timur

1. Meningkatnya pelayanan penegakan hukum polda Jatim yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme;
2. Menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil dan tertib dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur secara proaktif dan

antisipatif;

3. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polda Jatim agar menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM polri yang terintegrasi, holistik berkelanjutan;
4. Tersedianya infrastruktur dan peralatan strategis di Lingkungan Polda Jatim yang mendukung operasional kepolisian, pemeliharaan kamtibmas, pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkualitas, profesional, efektif, mudah diakses dan inklusif;
5. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Polda Jatim dan jajarannya.

b. Tujuan Biddokkes Polda Jatim:

1. Mewujudkan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang modern dan berstandar internasional;
2. Membangun sarana dan prasarana yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan;
3. Menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan kesehatan yang prima;
4. Menerapkan manajemen dokkes polri yang akuntabel dan berintegritas serta agile dan modern.

c. Tujuan Rumkit Bhayangkara Bojonegoro Biddokkes Polda Jatim

1. Menjamin Pelayanan Kesehatan terhadap Anggota Polri, PNS Polri, Keluarga, Masyarakat Umum;
2. Meningkatkan SDM Rumkit Bhayangkara Bojonegoro yang profesional
3. Tersedianya sarana prasarana yang modern dan canggih;
4. Menerapkan manajemen Rumkit Bhayangkara Bojonegoro yang terintegrasi dan terpercaya;
5. Memberikan kenyamanan dan kepuasan dalam pelayanan kesehatan.

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan oleh Rumah sakit, yang memberikan *outcome* dari program yang dilaksanakan oleh seluruh unit. Untuk mencapai hal tersebut Rumah sakit menetapkan Sasaran Strategis yang diturunkan dari Sasaran Strategis Poda Jawa Timur dan Biddokes Polda Jawa Timur. Dalam merumuskan sasaran strategis di

lingkungan Rumah sakit, ada beberapa kriteria yang ditetapkan, yaitu: mengukur pencapaian tujuan; mencerminkan berfungsinya outcomes dari program; selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan Biddokes Polda Jatim, sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah sakit, dan tetap sesuai dengan visi dan misi; memiliki sebab akibat (causality) secara logis dengan sasaran strategis Biddokkes Polda Jatim; jelas dan terukur; dan dilengkapi dengan indikator dan target.

Berikut adalah penjabaran sasaran strategis Bidokkes Polda Jatim dan RS Bhayangkara Tk.III Bojonegoro 2025 – 2029

a. Sasaran Strategis Polda Jawa Timur

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) Polri yaitu "keamanan dan ketertiban masyarakat yang terkendali, melalui kepolisian yang berintegritas, modern dan akuntabel", maka sasaran strategis Polda Jatim 2025-2029 yaitu:

1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi Jawa Timur yang Responsif dan Prediktif;
2. Penegakan Hukum yang Humanis Akuntabel dan Berkeadilan di wilayah hukum Polda Jawa Timur;
3. Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polda Jawa Timur yang Adaptif, Kompeten, dan Berintegritas secara Terpadu dan Optimal;
4. Infrastruktur Strategis Kepolisian Polda Jawa Timur yang Berdaya Guna dan Modern;
5. Tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polda Jawa Timur.

b. Sasaran Strategis Biddokkes Polda Jawa Timur

1. Pengembangan dan Pengelolaan SDM yang Adaptif, Kompeten, dan Berintegritas;
2. Terwujudnya almatsus, perbekalan dan fasilitas Dokkes Polri yang modern dan memadai sesuai kebutuhan;
3. Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel di lingkungan Biddokkes Polda Jawa Timur.
4. Terwujudnya pelayanan kedokteran dan kesehatan kepolisian yang modern dan Paripurna, berstandar internasional untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri;
5. Terselenggaranya pelayanan kedokteran kepolisian yang berstandar internasional;
6. Terselenggaranya pelayanan Kesehatan yang paripurna, bermutu dan merata sampai ke wilayah;
7. Terselenggaranya layanan laboratorium kedokteran Kesehatan kepolisian berdasarkan

standar ilmu pengetahuan dan teknologi;

8. Terwujudnya organisasi Dokkes Polri yang rasional, *agile* dan modern.

c. Sasaran Strategis Rumkit Bhayangkara Bojonegoro Biddokkes Polda Jawa Timur

1. Pengembangan dan Pengelolaan SDM yang Adaptif, Kompeten, dan Berintegritas;
2. Terwujudnya sarana dan prasarana Polri yang modern dan sesuai standar ;
3. Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel di lingkungan Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro Biddokkes Polda Jawa Timur.
4. Terwujudnya pelayanan kedokteran dan kesehatan kepolisian untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri;
5. Memberikan kenyamanan dan kepuasan dalam memberikan mutu layanan kesehatan

5. Keterkaitan Sasaran Impact, Tujuan dan Sasaran Strategis Biddokkes Polda Jawa Timur

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1	2
Mewujudkan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang modern dan berstandar internasional;	Terwujudnya pelayanan kedokteran dan kesehatan kepolisian yang modern dan Paripurna, berstandar internasional untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri; Terselenggaranya layanan laboratorium kedokteran Kesehatan kepolisian berdasarkan standar ilmu pengetahuan dan teknologi;
Membangun sarana dan prasarana yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan;	Terwujudnya almatsus, perbekalan dan fasilitas Dokkes Polri yang modern dan memadai sesuai kebutuhan
Menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan kesehatan yang prima;	1) Terselenggaranya pelayanan Kesehatan yang paripurna, bermutu dan merata sampai ke wilayah; 2) Terselenggaranya pelayanan kedokteran kepolisian yang berstandar internasional

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1	2
Menerapkan manajemen dokkes polri yang akuntabel dan berintegritas serta agile dan modern.	1) Pengembangan dan Pengelolaan SDM yang Adaptif, Kompeten, dan Berintegritas; 2) Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel di lingkungan Dokkes Jawa Timur. 3) Terwujudnya organisasi Dokkes Polri yang rasional, <i>agile</i> dan modern.;

3. Penahapan Kebijakan

Tahapan pertama Tahun 2025-2029 yaitu Modernisasi Operasional, dimana tahapan ini merupakan tahap pembaharuan dengan teknologi terkini serta meningkatkan instrument baik sistem, metode, platform, senjata, performa ataupun data center sehingga dapat secara maksimal meningkatkan kemampuan, kapasitas dan kapabilitas Polda Jatim dalam menjalankan tugas operasional sesuai fungsi Polri.

Modernisasi bertujuan untuk memodernisasi seluruh pelayanan dan sarana prasarana agar Polda Jatim mampu menjawab dinamika tantangan sesuai perkembangan teknologi terkini. Tahap ini meliputi peningkatan edukasi dan kolaborasi masyarakat, perbaikan sistem, layanan, regulasi, kualitas bank data, tata Kelola, kelembagaan, manajemen operasional, penguatan budaya organisasi maupun kapasitas dalam penanganan kejahatan siber serta kejahatan konvensional lainnya serta memantapkan kualitas sumber daya manusia yang akan mengawaki sistem teknologi yang diterapkan baik integritas maupun kompetensinya.

a. Tahun 2025

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kedokteran kepolisian , pengembangan IPAL dan melanjutkan pengembangan pembangunan Gedung perawatan lantai 3 dan 4,serta lift pengembangan pembangunan yang bertujuan memberikan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap Anggota, PNS Polri dan keluarga serta Masyarakat umum di wilayah rayonisasi Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Sat. Brimob Bojonegoro.

b. Tahun 2026

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kedokteran kepolisian Pembangunan Ramp/Selasar akses ke lantai 3 dan 4 gedung rawat inap angling dharma, penambahan layanan hemodialisis serta pengadaan alat Kesehatan dan Non alkes yang bertujuan memberikan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap Anggota, PNS Polri dan keluarga serta Masyarakat umum di wilayah rayonisasi Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Sat. Brimob Bojonegoro.

c. Tahun 2027

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kedokteran kepolisian pengembangan pembangunan Gedung 1 Lantai yang akan digunakan untuk Poliklinik dan pengadaan alat Kesehatan yang bertujuan memberikan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap Anggota, PNS Polri dan keluarga serta Masyarakat umum di wilayah rayonisasi Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Sat. Brimob Bojonegoro.

d. Tahun 2028

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kedokteran kepolisian dan melanjutkan pengembangan pembangunan Gedung lantai 2 untuk Ruang Operasi, ICU dan lantai 3 untuk Ruang Hemodialisis dan Ruang Rawat Inap,serta pengadaan alat Kesehatan yang bertujuan memberikan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap Anggota, PNS Polri dan keluarga serta Masyarakat umum di wilayah rayonisasi Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Sat. Brimob Bojonegoro.

e. Tahun 2029

Memantapkan pelayanan publik Rumah sakit yang berkualitas dan bersinergi dengan peningkatan kemampuan dan manajemen operasional, serta meningkatkan pelayanan kesehatan kedokteran dan Kepolisian di wilayah rayonisasi VII.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jatim.

Arah kebijakan dan strategi Polda Jatim akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Polri yang sudah menjabarkan arah kebijakan dan strategi Nasional yang telah ditetapkan pada RPJPN. Untuk memperkuat analisis, arah kebijakan dan strategi Polda Jatim diformulasikan dengan mempertimbangkan kondisi Polda Jatim saat ini dan kondisi yang ingin dicapai oleh Polda Jatim pada tahun 2029. Arah kebijakan Polda Jatim periode 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3
(SS1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Jawa Timur yang responsif dan prediktif	Peningkatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan serta memperkuat sistem keamanan negara secara responsif dan prediktif	Penguatan fungsi intelijen di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan dalam negeri serta meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui data sharing (termasuk pemberitahuan potensi ancaman kepada fungsi terkait); (G.S)
		Meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan di dalam dan luar negeri dengan mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan penyimpanan data digital terpadu/terpusat yang mengintegrasikan berbagai sumber input;(G.S)
		Mengoptimalkan operasi intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) terhadap potensi gangguan kamtibmas secara konvensional dan siber (Asta Cita)
		Meningkatkan keamanan siber di lingkungan kepolisian
		Mengoptimalkan kegiatan kontra intelijen pencegahan terorisme, tindak pidana pencucian uang, serangan siber, perjudian online dan transaksi <i>cryptocurrency</i> (Asta Cita)
		meningkatkan peran deteksi dini serta

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3
		pengecahan tindak pidana penyelundupan orang dan barang ilegal (Asta Cita)
		meningkatkan peran deteksi dini dan pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang dan kebocoran keuangan negara (Asta Cita)
	Peningkatan upaya keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik social dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsive dan prediktif;	meningkatkan kesadaran Kamtibmas di masyarakat melalui keterlibatan <i>stakeholder</i> terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas
		menumbuhkembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (<i>citizen-centric</i>) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (<i>community policing</i>); (G.S, <i>Quickwins</i>)
		mengoptimalkan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan bahaya judi dan judi <i>online</i> , kejahatan transnasional, dan penyelundupan barang ilegal; (Asta Cita)
		Memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan
		mengoptimalkan pencegahan aksi terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya dengan cara memperkuat sinergitas dengan institusi penegak hukum lainnya (<i>zero terrorist attack</i>); (Asta Cita)
		mengoptimalkan penanggulangan ancaman gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi di wilayah Jawa Timur
	Peningkatan pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakkan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Daerah Provinsi Jatim, ALKI, dan <i>Choke Point</i> secara responsif dan prediktif	mengoptimalkan pengamanan perairan dan udara guna mendeteksi ancaman keamanan dan keselamatan di laut Indonesia; (Asta Cita)
		meningkatkan kolaborasi dan peran aktif masyarakat pesisir dalam mendukung pengamanan laut.
	Peningkatan disiplin berlalu lintas	meningkatkan kesadaran, keselamatan,

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3
	melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;	ketertiban, kelancaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya; (G.S)
		meningkatkan reliabilitas dan transparansi layanan administrasi lalu lintas dengan memperluas model layanan berbasis digital; (G.S, <i>Quickwins</i>)
		mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri;
		meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan lalu lintas; (G.S)
		meningkatkan Turjawali di tengah masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya.
	Peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam Harkamtibmas;	Meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dengan masyarakat, institusi pemerintah aparat penegak hukum dan swasta untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban Masyarakat,
	Penguatan kegiatan operasional Polri berbasis teknologi dan <i>data analytics</i> ;	Mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) yang berbasis <i>data analytics</i> , guna meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/kebutuhan penanganan kejadian (G.S)
		Mengelola <i>data analytics</i> dari media konvensional dan digital secara efektif dalam penguatan kegiatan operasional kepolisian dan membangun kepercayaan publik
		Meningkatkan penanggulangan berita negatif (hoaks) yang dapat mengganggu Kamtibmas berdasarkan <i>media analytics</i>
		Memperkuat sistem informasi Polri berbasis " <i>Big Data Polr</i> "i dalam operasional polri

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3
		Melakukan pemutakhiran data kepolisian yang ter“update” secara akurat dan tepat waktu
		menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (misalnya, <i>hotline</i> , <i>police superapp</i> , <i>Whats App for business</i>); (G.S)
		meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi berbasis tingkat ancaman/gangguan; (G.S)
	Meningkatkan kehadiran Polri ditengah masyarakat secara optimal dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban Provinsi Jawa Timur	mendukung pelaksanaan program pemerintah (Posyandu, penurunan <i>stunting</i> serta swasembada pangan);
		meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas;
		meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas;
		meningkatkan keamanan dan ketertiban kawasan pariwisata; (Asta Cita)
		menjaga keamanan jalur logistik dan transportasi nasional; (Asta Cita)
		menciptakan ruang publik dan fasilitas umum yang aman bagi penyandang disabilitas dan kelompok difabel; (Asta Cita)
		mendukung dan meningkatkan dukungan keamanan di kompetisi olahraga, kesenian dan budaya secara profesional dan berstandar internasional; (Asta Cita).
		meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur Kepolisian (Asta Cita)
		mendukung dan memastikan tercapainya penyaluran subsidi kepada masyarakat secara tepat guna bagi masyarakat yang membutuhkan; (Asta Cita)
		menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika dan hak yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat; (Asta Cita)

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3
	Peningkatan kegiatan sadar Kamtibmas bagi masyarakat	mendukung penanggulangan dan penanganan bencana secara profesional; (Asta Cita)
		meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
		meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, penyelundupan manusia dan barang ilegal
		memperkuat keterlibatan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas dan mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas
	Peningkatan pelaksanaan operasi kepolisian.	melaksanakan kegiatan operasi kepolisian di tingkat Polda hingga ke wilayah;
		melaksanakan kegiatan keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan, bencana dan wabah;
		meningkatkan efektivitas pengamanan markas kepolisian daerah (Polda) maupun kewilayahan
	Peningkatan kegiatan pre-emptif dan preventif dalam perlindungan perempuan dan anak	meningkatkan sosialisasi terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak; (Asta Cita)
(SS2) Penegakan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan di wilayah Hukum Polda Jatim	Peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan secara transparan, akuntabel, dan berbasis ilmiah (<i>Scientific Criminal Investigation</i>);	menyelenggarakan layanan pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.
		meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum dalam rangka ungkap kasus;
		melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber
		mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan serta penanganan dan

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3
		penegakkan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup, terorisme, siber, <i>Illegal Mining</i> , <i>Illegal Fishing</i> , korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta penyelundupan manusia dan barang; (Asta Cita)
		melaksanakan penanganan konflik masyarakat secara humanis dan berkeadilan;
		mengoptimalkan dukungan penanggulangan terorisme dalam rangka meminimalisir risiko (penyelamatan sandera, penjinakan bom dan lain-lain); (Asta Cita)
		menangani kekhawatiran penduduk berjalan keluar di malam hari;
		memperkuat penerapan <i>Scientific Crime Investigation (SCI)</i> dalam pengolahan tempat kejadian perkara
		mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba dan penyelundupan orang maupun barang; (Asta Cita)
		meningkatkan keberhasilan dalam pengungkapan kejahatan di laut Provinsi Jawa Timur; (Asta Cita)
		memperkuat penegakkan hukum yang adil, transparan, legal, humanis dan setara serta menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan sistem pelaporan terpadu di seluruh Polri agar SOP dan Sistem Manajemen kasus terintegrasi; (G.S, <i>Quickwins</i>)
		memperkuat penerapan " <i>keadilan restoratif serta peran mediasi</i> " dalam penyelesaian konflik di masyarakat dan penegakkan hukum terbatas.
	Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasi;	mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polri dan aparat penegak hukum serta memperkuat adaptivitas

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3
	Percepatan penanganan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak secara humanis dan berkeadilan; Memberikan pelayanan penegakan hukum yang adil, transparan, humanis dan akuntabel. Peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam penegakkan hukum yang transparan, akuntabel, humanis, dan adil. Peningkatan Peningkatan kapabilitas dan kapasitas SDM Polri yang jujur, bermartabat dan berintegritas secara terpadu dan holistik	penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan; (G.S)
		melaksanakan standarisasi data kriminal nasional;
		melaksanakan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi
		memperkuat digitalisasi di lingkungan penegakkan hukum guna menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan <i>platform</i> pelaporan terpadu di lingkungan Polri;
		melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "keadilan restoratif" terhadap perempuan dan anak serta kaum disabilitas yang menjadi pelaku; (Asta Cita)
		mengoptimalkan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak
		menyediakan fasilitas rehabilitasi medis tindak pidana Narkoba;
		mengimplementasikan sistem penegakkan hukum yang terbuka dan akuntabel;
		mengoptimalkan SP2HP dalam penanganan perkara
		meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar organisasi dalam pemeliharaan dan peningkatan keamanan, serta penegakkan hukum di laut; (Asta Cita)
(SS3) Pengembangan dan pengelolaan SDM Polda Jatim yang adaptif, kompeten dan berintegritas secara terpadu dan optimal		memperkuat sinergisitas antar institusi aparat penegakkan hukum dalam penanggulangan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya.
		menyiapkan program diklat yang sesuai dengan tantangan tugas dan kebutuhan terkini;
		meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang berorientasi pada pelayanan publik serta memperhatikan kepuasan masyarakat;
		meningkatkan relevansi kurikulum dan bahan ajar

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3
		diklat dengan tantangan tugas;
		meningkatkan jumlah SDM Polri yang memiliki sertifikasi kompetensi; (Asta Cita)
		mengembangkan program kerja sama Diklat dalam negeri;
		meningkatkan jumlah pendidik yang telah memiliki sertifikasi kompetensi;
		memperkuat kapasitas, kapabilitas dan integritas SDM Polri yang berorientasi pelayanan masyarakat yang optimal;
		menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai bhayangkara dalam diri personel Polri;
		meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM P o l d a J a t i m dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polri berbasis teknologi dan data <i>analytics</i> ;
		memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak; (Asta Cita)
	Pengelolaan SDM secara profesional, akuntabel, dan terintegrasi.	meningkatkan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi serta menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mengartikulasikan kembali <i>Employee Value Proposition (EVP)</i> Polri; (G.S)
		memperkuat implementasi <i>merit system</i> , menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan <i>personalized learning</i> serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi; (G.S)
		menerapkan <i>system reward and punishment</i> berbasis kinerja;
		menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep <i>shared KPIs</i> dan <i>mentorship</i>); (G.S)

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3
		meningkatkan proporsi Polwan; (RPJMN)
		meningkatkan kesejahteraan SDM Polri (Asta Cita);
		meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi SDM Polda Jatim secara
		adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;
		melaksanakan rekrutmen kepolisian dengan prinsip BETAH dan sesuai dengan Analisis kebutuhan dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan eksternal dan internal sebagai sumber calon personel); (G.S)
		memperkuat implementasi pemenuhan personel berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK);
		meningkatkan kesehatan SDM Polda Jatim secara fisik, psikis, dan mental.
(SS4) Infrastruktur strategis Polda Jatim yang berdaya guna dan modern	Modernisasi Sarana dan Prasarana Polda Jatim	memetakan dan menyempurnakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polda Jatim tahun 2025-2029 dalam pemenuhan AlmatSus Polda Jatim untuk mendukung manajemen logistik dan fasilitas berbasis <i>MEPE</i> untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S)
		meningkatkan keselarasan TI Polda Jatim dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI POLRI (<i>I.T Enterprise Architecture</i>); (G.S)
		melakukan modernisasi sarana prasarana operasional pelayanan kepolisian sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat Polda sampai ke wilayah jajaran Polda Jatim; (Asta Cita)
		melakukan modernisasi sarana dan prasarana operasional keamanan perairan wilayah Provinsi Jawa Timur (kapal patroli laut);

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3
		mengoptimalkan kemampuan digital dengan mengembangkan <i>Data Digital Platform and Software (DDPS)</i> serta pengembangan <i>Artificial Intelligence (AI)</i> Kepolisian yang terintegrasi dalam Satu Data Polri;
		memaksimalkan kapabilitas analitik <i>Big Data/ Single Data Entry</i> Polri untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan strategis dan operasional Polri; (G.S)
		mengimplementasikan <i>smart security</i> di Mako Polda Jatim dan Mako Satwil Jajaran Polda Jatim;
		menyiapkan pembangunan ruang dan fasilitas kerja bagi SDM Polda Jatim berkebutuhan khusus;
		mengimplementasikan tata kelola dan sistem kearsipan dan naskah dinas yang modern;
		memperkuat sistem data dan informasi hukum Polri;
		meningkatkan sarana dan prasarana keamanan siber di lingkungan Polda Jatim;
		mengintegrasikan sistem informasi dan komunikasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri dalam rangka Harkamtibmas dan Gakkum;
		Mengusulkan pembangunan rumah dinas/flat dan rusun bagi personel Polda Jatim
	Mengoptimalkan hasil Litbang Polri	ikut serta dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Polri
	Pengelolaan aset kepolisian yang akuntabel, terbuka, modern dan terintegrasi.	menyempurnakan sistem manajemen logistik dan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S)
	Peningkatan pelayanan publik yang prima dan kedekatan dengan masyarakat;	menerapkan sistem pengelolaan dan membangun rumah dinas/flat/barak dan rusun bagi personel Polda Jatim;
	Penguatan Reformasi Birokrasi dan	meningkatkan efektivitas dan optimalisasi

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3
(SS5) Tata Kelola yang bersih, transparan dan akuntabel dilingkungan Polda Jatim	Transformasi Kelembagaan Polri	pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Polda Jatim;
		menyediakan dan meningkatkan kualitas dan fasilitas Kesehatan (rumah sakit/FKTP) dan layanan Kesehatan yang memadai bagi anggota Polri hingga tingkat Polres;
		meningkatkan kualitas dan fasilitas kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim yang paripurna dalam mendukung tugas dan fungsi Polri serta program nasional;
		melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.
		meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Jatim serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polda Jatim dengan menstandarisasi, menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP; (G.S)
		menyederhanakan proses pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur; (Asta Cita)
		meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan data dan informasi kriminal nasional
		meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan Markas di lingkungan Polda Jatim dan Satwil Jajaran Polda Jatim;
		memperkuat keterlibatan Personil Polda Jatim dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan secara personal serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi kepolisian dan masyarakat; (G.S)
		meningkatkan pengelolaan citra Polda Jatim di masyarakat;
		memperkuat kerja sama antara masyarakat, TNI dan DPR yang dapat mendukung kinerja Polri;
		menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dilakukan dengan kendali mutu dan biaya, disertai

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3
		sarana dan prasarana Faskes yang memadai (BPJS Kesehatan); meningkatkan efektivitas sistem pengaduan masyarakat; (<i>Quickwins</i>) membangun sistem penerapan budaya integritas, nilai-nilai kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian dengan memedomani kode etik Polri; mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat; (G.S) meningkatkan sistem manajemen kerja personil Polda jatim (SIABK) dari tingkat Polda sampai dengan Polsek; melakukan pengkajian dan penataan tusi (tugas dan fungsi) Polri di tingkat Polda sampai Kewilayahan guna mengonsolidasikan fungsi-fungsi tertentu di organisasi Polri dengan menciptakan model <i>shared services</i>; (G.S) memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi Polri di tingkat Polda sampai Kewilayahan mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal (rasionalisasi organisasi) dengan menerapkan <i>Strategic Workforce Planning</i>; (G.S) meningkatkan akuntabilitas dan <i>agility</i> dari organisasi dengan menyempurnakan model tata kelola dan model operasional; (G.S) melakukan pengkajian dan penyederhanaan birokrasi yang lebih ramping dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>), pengaturan organisasi yang memprioritaskan keberadaan jabatan fungsional dalam pengaturan susunan organisasi, dan pengalihan jabatan struktural eselon III ke bawah ke dalam jabatan fungsional

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3
		melakukan pengkajian pembentukan satuan wilayah pada wilayah pemekaran;
		meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal guna meningkatkan adaptabilitas dan kelincahan organisasi dengan menyempurnakan sistem tata kelola; (G.S)
		memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah guna menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polri;(G.S)
	Penguatan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.	meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri;
		melakukan penyelarasan kinerja Polda Jatim sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana serta merancang ulang sistem manajemen kinerja dan metode penilaian kinerja; (G.S)
		membangun alokasi anggaran pada klasifikasi jenis belanja secara proporsional;
		memperkuat akuntabilitas kinerja dan anggaran Polri;
		memperkuat sistem dan kualitas pelaporan keuangan Polda Jatim yang akuntabel, terintegrasi dan bersifat <i>real time</i> .
	Penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif;	meningkatkan kualitas penanganan komplain/pengaduan masyarakat Jawa Timur secara efektif dan terpercaya;
		meningkatkan mekanisme pengelolaan bantuan hukum;
		meningkatkan efektivitas harmonisasi dan penyelarasan regulasi pemerintah ke tingkat Polri;
		mempercepat proses pemenuhan regulasi di lingkungan Polda Jatim
		meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan regulasi di lingkungan Polda Jatim

2. Arah dan Kebijakan Biddokkes Polda Jatim

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	2	3
(SS1) Terwujudnya pelayanan kedokteran dan kesehatan kepolisian yang modern dan Paripurna, berstandar internasional untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri;	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kedokteran kepolisian yang mendukung tugas pokok dan fungsi Polri.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas identifikasi korban berdasarkan metode yang modern
		Mempercepat proses identifikasi korban guna mendukung tugas dan fungsi Polri.
	Pemantapan layanan Kesehatan Polri yang mendukung tugas pokok dan fungsi Polri.	Meningkatkan kinerja pelayanan Kesehatan di pusat dan di wilayah secara paripurna.
		Memantapkan Sembilan area yang menjadi indikator kepuasan layanan Kesehatan.
(SS2) Terselenggaranya layanan laboratorium kedokteran Kesehatan kepolisian berdasarkan standar ilmu pengetahuan dan teknologi;	Pemantapan proses identifikasi korban bencana menggunakan prosedur berstandar internasional.	Menstandarkan proses identifikasi korban sesuai dengan prosedur ICPO/Interpol.
		Mengintegrasikan database antemortem dalam mendukung proses indentifikasi korban.
	Peningkatan layanan kedokteran kepolisian berstandar internasional	Meningkatkan layanan kedokteran forensik (forensik patologi, forensik klinik, forensik antropologi)
		Meningkatkan layanan Keskamtibmas di Polda dan di wilayah
		Meningkatkan layanan odontology kepolisian di pusat dan di wilayah
		Mengintegrasikan data base odontogram sampai ke wilayah.
(SS3) Terselenggaranya pelayanan Kesehatan yang paripurna, bermutu dan merata sampai ke wilayah;	Pemantapan layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Bhayangkara.	Meningkatkan pembangunan dan pembentukan Rumah Sakit Bhayangkara
		Melakukan pemenuhan persyaratan untuk akreditasi Rumah Sakit Bhayangkara.
		Mengembangkan layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Bhayangkara.
		Meningkatkan kelas/status Rumah Sakit

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	2	3
	Pemantapan layanan Kesehatan pada FKTP	Bhayangkara.
		Meningkatkan pembangunan dan pembentukan FKTP.
		Melakukan pemenuhan persyaratan untuk akreditasi FKTP.
		Mengembangkan layanan Kesehatan pada FKTP.
		Meningkatkan kelas/status FKTP.
	Pemantapan layanan rikkes berkala personel Polri.	Meningkatkan layanan rikkes berkala.
		Meningkatkan target dan cakupan personil Polri yang melakukan rikkes berkala.
		Memantau hasil rikkes berkala personil Polri.
(SS4) Terwujudnya almatsus, perbekalan dan fasilitas Dokkes Polri yang modern dan memadai sesuai kebutuhan	Pemenuhan almatsus, perbekalan dan fasilitas Dokkes Polri yang modern dan memadai sesuai kebutuhan.	Melakukan pemenuhan dan modernisasi sarpras (Matfaskes, Almatsus dan aplikasi) secara bertahap.
(SS5) Pengembangan dan Pengelolaan SDM yang Adaptif, Kompeten, dan Berintegritas	Peningkatan kemampuan SDM Biddokkes polda Jatim	Menyelenggarakan peningkatan kemampuan SDM Dokkes Polri sesuai kebutuhan
		Memetakan rencana kebutuhan SDM Dokkes Polri.
	Peningkatan kualitas SDM Dokkes Polri sesuai dengan kebutuhan.	Melaksanakan Dikjur Dokpol.
(SS6) Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel di lingkungan Dokkes Jawa Timur	Peningkatan pelayanan publik yang prima dan kedekatan dengan masyarakat;	Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat umum dan personel Polri dilakukan dengan kendali mutu dan biaya, disertai sarana dan prasarana faskes yang memadai (BPJS Kesehatan), unit penanggung jawab Biddokkes dan Rumkit Bhayangkara Polda Jatim.
		Menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Biddokkes
	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Dokkes Polri	Menyusun LKIP Biddokkes
	Penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran	Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Biddokkes
		Meningkatkan nilai IKPA Biddokkes

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	2	3
(SS7) Terwujudnya organisasi Dokkes Polri yang rasional, <i>agile</i> dan modern	Penguatan organisasi Dokkes Polri	Menerapkan organisasi biddokkes yang agile dan modern.
		Mewujudkan organisasi Dokkes Polri yang tepat struktur dan tepat fungsi
	Pemetaan dan penataan regulasi terkait pelayanan Kesehatan Polri	Melakukan penyusunan regulasi terkait pelayanan Kesehatan Polri sesuai kebutuhan dan perkembangan terkini.
	Pemetaan dan penataan regulasi terkait	Melakukan penyusunan regulasi terkait pelayanan kedokteran kepolisian sesuai kebutuhan dan perkembangan terkini.
	Sistem dan metode Dokkes Polri yang <i>up to date</i>	Melakukan penyusunan proses bisnis sesuai dengan perubahan organisasi dan peraturan terkini.
		Melakukan penyusunan SOP sesuai dengan perubahan organisasi, peraturan terkini, dan proses bisnis terkini.

1. Arah kebijakan dan Strategi Rumkit Bhayangkara Bojonegoro Biddokkes Polda Jatim

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	2	3
(SS1) Terselenggaranya pelayanan kedokteran dan kepolisian	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kedokteran kepolisian yang mendukung tugas pokok dan fungsi Polri.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas identifikasi korban berdasarkan metode yang modern
		Mempercepat proses identifikasi korban guna mendukung tugas dan fungsi Polri.
	Pemantapan layanan Kesehatan Polri yang mendukung tugas pokok dan fungsi Polri.	Meningkatkan kinerja pelayanan Kesehatan di pusat dan di wilayah secara paripurna.
		Memantapkan Sembilan area yang menjadi indikator kepuasan layanan Kesehatan.
(SS3) Terselenggaranya pelayanan Kesehatan	Pemantapan layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Bhayangkara.	Meningkatkan pembangunan dan pembentukan Rumah Sakit Bhayangkara

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	2	3
yang paripurna, bermutu dan merata sampai ke wilayah;		Melakukan pemenuhan persyaratan untuk akreditasi Rumah Sakit Bhayangkara.
		Mengembangkan layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Bhayangkara.
		Meningkatkan kelas/status Rumah Sakit Bhayangkara.
	Pemantapan layanan Kesehatan	Meningkatkan pembangunan dan pemenuhan sarana prasarana.
		Melakukan pemenuhan persyaratan untuk akreditasi RS.
		Mengembangkan layanan Kesehatan pada RS.
		Meningkatkan kelas/status RS
	Pemantapan layanan rikkes berkala personel Polri.	Meningkatkan layanan rikkes berkala.
		Meningkatkan target dan cakupan personil Polri yang melakukan rikkes berkala.
		Memantau hasil rikkes berkala personil Polri.
	Peningkatan kemampuan SDM RS Bhayangkara Bojonegoro Polda Jatim	Menyelenggarakan peningkatan kemampuan SDM Dokkes Polri sesuai kebutuhan
		Memetakan rencana kebutuhan SDM RS Bhayangkara Bojonegoro Polda Jatim.
(SS3) Terselenggaranya Sistem Pengawasan Rumkit Bhayangkara Bojonegoro yang akuntabel guna mendukung tata elola yang bersih, terbuka, dan Tansparan	Peningkatan kualitas SDM RS Bhayangkara Bojonegoro Polda Jatim sesuai dengan kebutuhan.	Melaksanakan Pelatihan peningkatan kemampuan kompetensi SDM.
	Peningkatan pelayanan publik yang prima dan kedekatan dengan masyarakat;	Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat umum dan personel Polri dilakukan dengan kendali mutu dan biaya, disertai sarana dan prasarana faskes yang memadai (BPJS Kesehatan), unit penanggung jawab Rumkit Bhayangkara Bojonegoro Polda Jatim
		Menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Biddokes
	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Rumkit Bhayangkara Bojonegoro	Menyusun LKIP Rumkit Bhayangkara

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	2	3
		Bojonegoro Polda Jatim
	Penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran	Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Rumkit Bhayangkara Bojonegoro Polda Jatim
		Meningkatkan nilai IKPA Rumkit Bhayangkara Bojonegoro Polda Jatim

2. Kerangka Regulasi

Rumkit Bhayangkara Bojonegoro dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan pedoman-pedoman atau aturan-aturan sebagai petunjuk yang mengikat bagi personil sendiri maupun stake holders. Aturan atau regulasi yang ada pada Rumkit Bhayangkara Bojonegoro ditujukan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Rumkit Bhayangkara Bojonegoro jangka menengah maupun jangka pendek.

Renstra Rumkit Bhayangkara Bojonegoro merupakan alat untuk mencapai tujuan Rumkit Bhayangkara Bojonegoro selain berisi perencanaan strategis juga berisi tentang instrument yang tersusun dalam kerangka regulasi Rumkit Bhayangkara Bojonegoro. Kerangka regulasi pada Renstra Rumkit Bhayangkara Bojonegoro berisi tentang kebutuhan regulasi dilingkungan Rumkit Bhayangkara Bojonegoro berbentuk peraturan-peraturan, standart operasional prosedur dan pedoman-pedoman yang direncanakan akan dibuat selama 5 (lima) tahun kedepan sejalan dengan kebijakan Rumkit Bhayangkara Bojonegoro 2025 - 2029.

Capaian Rumkit Bhayangkara Bojonegoro selama tahun 2025 - 2029 di bidang regulasi telah berhasil menyusun peraturan/SOP/pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Rumkit Bhayangkara Bojonegoro dalam bentuk Surat Keputusan peraturan/SOP/pedoman. Peraturan tersebut dibuat dalam rangka mendukung kebijakan Rumkit Bhayangkara Bojonegoro dalam mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Polri.

Kerangka regulasi dalam renstra Rumkit Bhayangkara Bojonegoro memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi peraturan / SOP / pedoman yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Rumkit Bhayangkara Bojonegoro dan juga rencana usulan penghapusan peraturan/SOP/pedoman yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dari isu strategis dibidang kedokteran dan kesehatan terhadap peningkatan mutu pelayanan bidang kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan disusun kerangka regulasi berdasarkan prioritas antara lain :

1. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pada dukungan kesehatan pada tugas operasional Polri.
2. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan personil pada Rumkit Bhayangkara TK. III Wahyu Tutuko Bojonegoro beserta keluarganya, diperlukan peraturan tentang Pelayanan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Bojonegoro.
3. Dalam rangka upaya kesehatan promotif dan preventif diperlukan pedoman/SOP.
4. Dalam rangka pelaksanaan penerimaan calon personil Rumkit Bhayangkara Bojonegoro dan pendidikan pengembangan personil, diperlukan penyempurnaan peraturan tentang pemeriksaan kesehatan seleksi.
5. Dalam rangka menjaga kesehatan personil, diperlukan penyempurnaan peraturan tentang pemeriksaan berkala.
6. Pembuatan peraturan, pedoman/petunjuk, penyusunan naskah dan buku lainnya dalam rangka operasional Rumkit Bhayangkara Bojonegoro

Kerangka Regulasi

No	Sasaran Strategis	Regulasi terkait yang sudah ada	Kebutuhan Regulasi	Keterangan
1	Pelayanan Kesehatan Kedokteran kepolisian	1.Perkap No.12 Tahun 2011 2.Perpol No. 8 Tahun 2018 3.Perkap no.1 tahun 2013 4. SOP Yan Dokpol	1. Perkap tentang kedokteran Kepolisian 2.Perkap tentang Pelayanan Yankestu 3.Perkap tentang penyelenggaraan kesehatan kesamaptaaan gigi dan mulut 4.SOP tentang pelayanan DOKPOL	Ur Dokpol
		1. Perkap Nomor 1 Tahun 2010	pedoman pengelolaan dana pemeliharaan kesehatan di lingkungan Polri	

No	Sasaran Strategis	Regulasi terkait yang sudah ada	Kebutuhan Regulasi	Keterangan
	dan keluarganya serta masyarakat umum di Rumkit Bhayangkara Bojonegoro serta jajaran	2.Perkap No.11 Tahun 2011 3.SOP Keperawatan 4.Perkap 99 tahun 2020 5.PP nomor 28 tahun 2024 6.Perpol No.15 Tahun 2024 7.Perpres No.46 tahun 2025	2.Perkap tentang pedoman penyelenggaraan RSB 3.SOP tentang pelayanan keperawatan di unit IGD, rawat jalan dan rawat Inap 4.Perkap Tentang Sistem pembinaan SDM 5.Perkap Klasifikasi rumah sakit 6.Perpol yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa 7.Perpres yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa	
	Sistem pengawasan Rumkit Bhayangkara Bojonegoro yang akuntabel guna mendukung tata kelola Pemerintah yang bersih dan Trasparani	1. Permenkes RI No.741/menkes /PER/VII/2008 2. Permen PAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017	1.Permenkes tentang Standar Pelayanan Minimal 2.Permen Pan -RB tentang Indeks Kepuasan Masyarakat	

4. Kerangka Kelembagaan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Rumkit Bhayangkara Bojonegoro pada tingkat Biddokkes Polda Jatim, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010, pada tingkat Kepolisian Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2011

Berkaitan dengan perubahan tingkat Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro Bojonegoro dari tingkat D berubah menjadi tingkat C maka pada tahun 2021 revisi / penyempurnaan struktur organisasi Rumkit Bhayangkara Bojonegoro antara lain:

- a. Tupoksi organisasi, disesuaikan dengan struktur yang terbentuk dan mengakomir seluruh tugas yang ada;
- b. Struktur organisasi disesuaikan dengan analisa kebutuhan;
- c. Penataan Daftar Susunan Personil dan Peralatan (DSPP) disesuaikan dengan analisa beban kerja;
- d. Perubahan nomenklatur, disesuaikan dengan struktur dan ketentuan yang berlaku;
- e. Peninjauan struktur jabatan.

Dari arah kebijakan dan strategi yang ada maka untuk mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan Rumkit Bhayangkara Bojonegoro, dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya Pelayanan kesehatan Kedokteran dan Kepolisian (Dokpol)	Memberikan pelayanan kedokteran dan kepolisian dengan professional	01 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri						
			3072 Pelayanan kesehatan Polri						
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan kualifikasi	Penguatan HTCK dilingkungan Rumah Sakit Bhayangkara	1				
				Penataan DSPP disesuaikan dengan ABK		2			
				Peningkatan kemampuan kemampuan personel Dokpol	4	4	4	4	4
	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan yang profesional dan paripurna dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan pasien	Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku	01 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri						
			3072 Pelayanan kesehatan Polri						
			Memberikan pelayanan kesehatan yang prima	Penambahan cakupan pelayanan	1	1	1	1	1
				Pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas	1	11	5	5	3

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KARUMKIT BHAY.BOJONEGORO
NOMOR : KEP/ 281 /VII/2025
TANGGAL: 31 JULI 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			02. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana prasarana						
			3084. Pengembangan Peralatan Polri						
			Tersediannya Peralatan yang cangih dan modern						
			Pengadaan alkes dan non alkes	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	30 Unit	40 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit
			5062. Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri						
			Pengembangan Ipal	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1				
			Membangun Gedung Rawat Inap	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	1	1	1	
			Pembangunan Selasar ke lantai 3 dan 4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan		1			
			Membangun Ruang Operasi dan ICU	Peningkatan Pelayanan Kesehatan			1	1	

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan sasaran strategis Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro Tahun 2025 - 2029, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level regional, Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis, dan 8 (Delapan) Indikator Kinerja Utama yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target					Unit Penang-gung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	
1		2		3	4	5	6	7	8
SS1	Terselenggaranya pelayanan Kedokteran Kepolisian	IKU 1	Presentase Pelayanan Dokpol	92 %	93 %	94 %	95 %	96 %	Subbid Yanmeddokpol
SS2	Terselenggaranya pelayanan Kesehatan yang paripurna, bermutu dan merata di Wilayah Bojonegoro dan sekitarnya	IKU 2	Presentase Peningkatan Jumlah Pasien Rawat Inap	102%	103%	104%	105%	106%	Subbid Yanmeddokpol
		IKU 3	Presentase Peningkatan Jumlah Pasien Rawat Jalan	102%	103%	104%	105%	106%	
		IKU 4	Presentase Peningkatan Kompetensi SDM	≤ 80%	≤ 80%	≤ 80%	≤ 80%	≤ 80%	Subbag Binfung
		IKU 5	Penambahan alkes dan non alkes	80%	81%	82%	83%	83%	Subbid Jangmedium
SS 3	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Rumkit Bhayangkara Bojonegoro yang akuntabel guna mendukung tata elola yang bersih, terbuka, dan Tansparan	IKU 6	Indeks Kepuasan Pelayanan Pseien	80	81	82	82	84	Was Intern
		IKU 7	Presentase Penanganan komplain terkait pelayanan Kesehatan	75 %	76 %	77 %	78 %	79 %	Was Intern
		IKU 8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	80	81	82	83	84	RENMIN

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan beberapa Program di Satker Rumkit Bhayangkara Bojonegoro, yaitu sebagai berikut:

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri;
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri

2. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan sasaran strategis Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Rumkit Bhayangkara Nganjuk, maka dibutuhkan pendanaan yang difokuskan untuk operasional Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro dan pemenuhan fasilitas dan peralatan kesehatan dan peningkatan profesionalisme Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro. Sumber pendanaan tersebut selain berasal dari Rupiah Murni dan BLU.

a. Kerangka Pendanaan Program Tahun 2025

Kode	Uraian	Pagu 2025
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	28.623.641.000,-
3072	Pelayanan Kesehatan Polri	25,312,876,000,-
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran	3,433,945,000,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	8.718.068.000,-
3084	Pengembangan Peralatan Polri	1.350.000.000.-
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	489,558,000,-
5061	Dukungan Layanan Perkantoran	172,972,000,-
5062	Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri	655,538,000,-
5062	Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri	6.500.000.000,-
	Jumlah	36.491.164.000,-

b. Kerangka Pendanaan Program Tahun 2026-2029

NO	KAGIATAN	TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Program Dukungan Manajemen	28,010,765,000	32,907,765,000	35,517,465,000	35,517,465,000	37,938,135,000
3072	Pelayanan Kesehatan Polri	24,700,000,000	29,597,000,000	32,206,700,000	32,206,700,000	34,627,370,000
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	3,310,765,000	3,310,765,000	3,310,765,000	3,310,765,000	3,310,765,000

KODE	KEGIATAN	2025	T.A 2026	TA 2027	TA 2028	TA 2029
1	2	3	4	5	6	7
2	Dukungan peningkatan sarana prasarana					
3084	Pengembangan Peralatan Polri	1,350,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000
5061.EBA	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000
5062.EBA	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	660,000,000	961,332,000	961,332,000	961,332,000	961,332,000
5062 CBM	Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri	6,500,000,000	2,200,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	
JUMLAH		38,290,765,000	39,839,097,000	46,748,797,000	47,248,797,000	43,169,467,000

Kerangka pendanaan diuraikan dalam matrik pembangunan jangka menengah Rumkit Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro tahun 2025 - 2029, secara lebih rinci sebagaimana tersebut sub lampiran "A"

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah Rumah sakit, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Rumah sakit dalam mendukung agenda pembangunan daerah.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Rumah sakit Bhayangkara Bojonegoro. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Karyawan Rumah Sakit sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Rumah sakit Bhayangkara Bojonegoro Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga pelayanan kesehatan kedokteran kepolisian dapat berjalan dengan baik.

1. Kaidah Pelaksanaan

- a. Dengan komitmen seluruh unsur pimpinan dan fungsi pelaksana Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro di semua level terus berupaya mewujudkan dukungan kesehatan kepolisian dan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, bermoral dan modern;
- b. Membangun kemitraan secara sinergis dengan lembaga/institusi/komponen masyarakat dalam rangka mewujudkan visi misi Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro yang bermanfaat bagi Polri dan masyarakat;
- c. Pertumbuhan dan pembelajaran baik sebagai individu maupun organisasi Dokkes Polri sehingga meningkatkan proses dan kinerja secara berkelanjutan
- d. Pelayanan prima, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, humanis, tidak diskriminatif dan etis;
- e. Kegiatan operasional Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro yang dilaksanakan pada prinsipnya terprogram dan dilaksanakan berdasarkan arahan dan perintah Kepala Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro guna mengurangi dan mencegah terjadinya kekeliruan, kesalahan dan penyimpangan pelaksanaan.

2. Autentikasi dan Distribusi

- a. Autentifikasi, rencana strategi Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Tahun 2025 - 2029 disahkan oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro sebagai pimpinan satuan kerja sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;

- b. Distribusi, didistribusikan kepada seluruh Kasubbag dan Kaur Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro untuk dijabarkan ke dalam rencana tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program dan kegiatan.

Demikian rencana strategis Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro tahun 2025 - 2029 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro.



Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 31 Juli 2025
PS KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BOJONEGORO

dr. LINDAWATI, Sp.M.
KOMISARIS POLISI NRP 72070739

LAMPIRAN

POLRI DAERAH JAWA TIMURP
 BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
 RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BOJONEGORO

LAMPIRAN I
MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2029

[illegible]

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	IDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN					ALOKASI BASELINE					ALOKASI 2025-2029	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Polri	Mendukung Tugas Pembinaan dan Operasional Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk melalui ketersediaan Sarana dan Prasarana Materil, Fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas													
3084	Pengembangan Peralatan Polri	Terwujudnya peralatan kesehatan Polri dalam mendukung kesejahteraan personil	Ketersediaan peralatan kesehatan di Rumkit Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro	30 unit	40 unit	25 unit	25 unit	40 unit	1.350.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	6.350.000.000	
5059	Dukungan Manajemen dan teknik Sarpras	Meningkatkan kualitas pelayanan internal sarpras	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	2.100.000.000	
5061	Layanan Perkantoran	Dukungan BMP	Terpenuhinya kegiatan Operasioanl	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	172.792.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	1.572.792.000	
5062	Pengembangan fasilitas dan Konstruksi Polri	Terwujudnya Polri dalam mendukung kesejahteraan personil	Ketersediaan bangunan di Rumkit Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro	1 unit	1 unit	1 unit	-2 Unit	-	6.500.000.000	2.200.000.000	7.000.000.000-	7.000.000.000-	-	22.700.000.000-	

Bojonegoro, 31 Juli 2025
PS KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BOJONEGORO



dr. LINDAWATI, Sp.M
KOMISARIS POLISI NRP 78041235

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
 BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BOJONEGORO

LAMPIRAN II

MATRIKS KERANGKA REGULASI RUMKIT BHAYANGKARA BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2029

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Penyusunan/Revisi SOP Dokpol		Kaur Dokpol	Unit Keperawatan					√
2	Penyusunan/ revisi SOP pelayanan Keperawatan dan pelayanan medis		Kaur Yanwat	IGD, Rawat Inap, Rawat Jalan, ICU, Kamar Operasi					√
3	Mengusulkan revisi PMK tarif Rumkit Bhayangkara Nganjuk ke Kemenkeu	Masa berlaku sudah lebih dari 2 (dua) tahun, ada beberapa item tarif yang sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini sehingga perlu penambahan atau koreksi	Masa berlaku sudah lebih dari 5 (lima) tahun, ada beberapa item yang sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini sehingga perlu penambahan atau koreksi	Unit Rawat Inap, Rawat Jalan, IGD, ICU, OK, Laborat, Radiologi, Instalasi Gizi	√			√	
4	Pelaksanaan survey Akreditasi Rumkit versi SNARS	Masa berlaku akreditasi perdana versi baru setelah 1 (satu) tahun dilakukan survey akreditasi kembali oleh KARS, karena ada penambahan 6 pokja pelayanan.		Unit Rawat Inap, Rawat Jalan, IGD, ICU, OK, Laborat, Radiologi, Instalasi Gizi		√			√



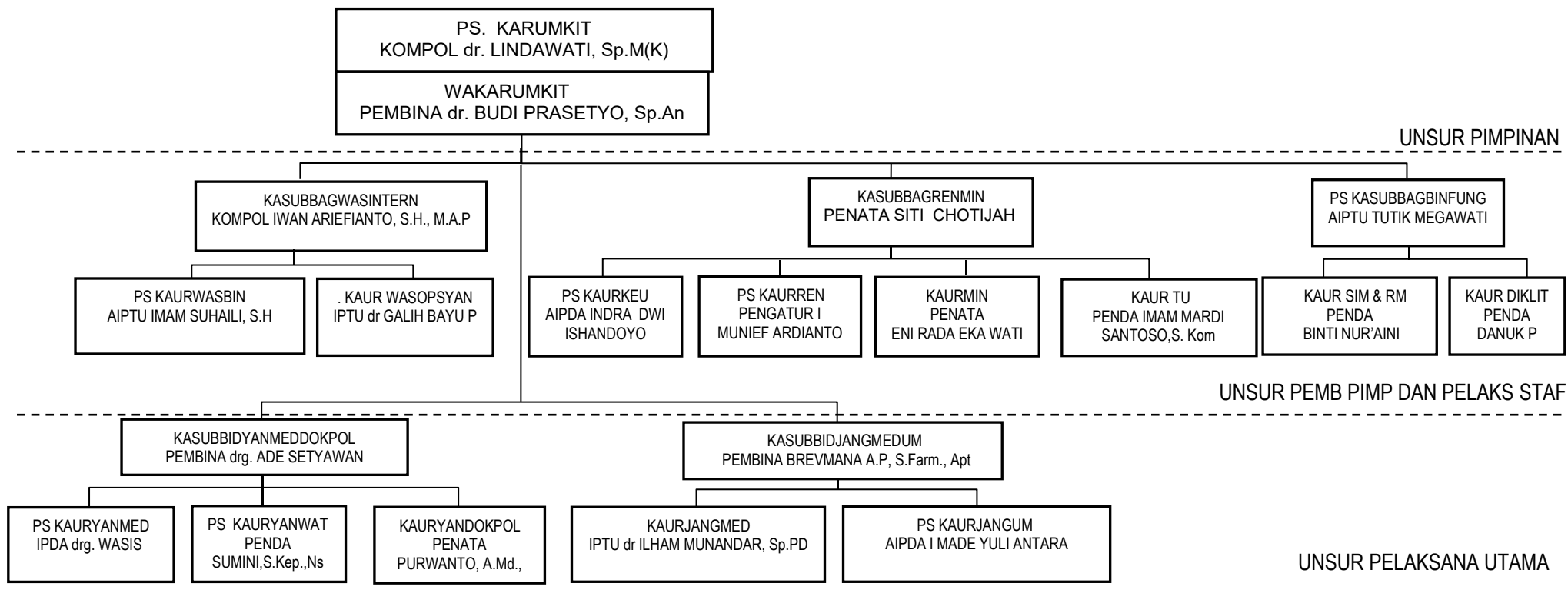
Bojonegoro, 31 Juli 2025
 PS KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BOJONEGORO

dr. LINDAWATI, Sp.M
 KOMISARIS POLISI NRP 78041235

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
RS. BHAY. TK. III WAHYU TUTUKO BOJONEGORO

BERDASARKAN :
PERKAP KAPOLRI NOMOR 11 TAHUN 2011
TANGGAL 30 JUNI 2011

STRUKTUR ORGANISASI
RS. BHAY. TK. III WAHYU TUTUKO BOJONEGORO



Ditetapkan di : Bojonegoro
pada tanggal :

2 Januari 2025

PS. KARUMKIT BHAY. WAHYU TUTUKO BOJONEGORO



dr. LINDAWATI, Sp. M(K)
KOMISARIS POLISI NRP 78041235